

LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 101,22 (Kategori Baik).

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 3 Februari 2026

A handwritten signature in blue ink, belonging to Machmud, the Director General of the Directorate of Strengthening Competitiveness of Marine and Fisheries Products (Ditjen PDSPKP).

Machmud

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Machmud

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Andika Adisukma

Agustina Pujiastuti

Rifai Dwi Prasetio

Ayu Wahdania

Muqaromah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan PK tersebut, terdapat lima indikator kinerja yang terdiri dari dua Indikator yang periode pelaporannya bersifat triwulanan, satu bersifat semesteran, dan dua bersifat tahunan.

Sebanyak lima indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 101,22% (Kategori Baik).

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dengan Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta), Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar), Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun), Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)
2. Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP dengan Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPSKP (Nilai)
3. Tiga indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat triwulanan yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut, Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya, dan Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas; dan dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat tahunan yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.
4. Indikator kinerja yang belum mencapai target tahun 2025 yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dengan prognosa sampai dengan desember sebesar USD 320

juta atau 55,74% dari target yaitu USD 574 juta atau setara dengan 35,63% dari target RENSTRA sebesar USD 898 juta.

5. Indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target pada Tahun 2025 adalah Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya dengan capaian prognosa sampai Desember sebesar USD 5,85 miliar atau setara dengan 102,99% dari target 2025 sebesar USD 5,68 miliar dan 76,97% terhadap target RENSTRA sebesar USD 7,70 miliar; Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri dengan capaian sebesar Rp335,53 triliun atau setara dengan 108,06% dari target 2025 sebesar 310,51 triliun dan 95,32% dari target RENSTRA sebesar 352,01 triliun; Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas dengan capaian 6,01% atau setara 120,2% dari target 2025 sebesar 5% dan setara 85,86% dari target RENSTRA sebesar 7%, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 90,84 atau setara 105,63% terhadap target tahun 2025 sebesar 86 dan setara 103,22 terhadap target RENSTRA sebesar 88.
6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp218.791.500.000,- (*Dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNPB. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp63.961.836.000,- (*enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp154.829.664.000,- (*seratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*) Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp152.442.506.000,- (*seratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah*) atau setara dengan 69,67% terhadap total pagu anggaran awal atau 98,46% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Tugas dan Fungsi	2
4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6
5. Permasalahan Utama	6
A. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri	6
B. Permasalahan dan Tantangan Global	10
6. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
1. Rancangan Rencana Strategis	17
A. Visi	17
B. Misi	19
C. Tujuan	20
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
1. Capaian Kinerja	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	23
Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	24
A. Nilai Ekspor Rumput Laut.....	24

B. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	30
C. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri.....	59
D. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas	80
Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP.....	88
A. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	88
3. Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP.....	103
1. Kesimpulan.....	103
2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	103
3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025	104
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025	21
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025.....	23
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut	24
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	31
Tabel 5. Rencana Kebutuhan Impor Tahun 2026.....	41
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri.....	60
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas	81
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	88
Tabel 9. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025 (Dalam Rp.000)	102
Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2025 (Dalam Rp.000)	102
Tabel 11. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2025	103
Tabel 12. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	5
Gambar 3.	Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6
Gambar 4.	Sistematika Peyajian	16
Gambar 5.	Capaian NKO pada tahun 2025	22
Gambar 6.	Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	29
Gambar 7.	Fasilitasi promosi dagang dan perluasan jejaring bisnis internasional	30
Gambar 8.	Menghadiri FGD Ketentuan Asal Barang dalam I-EU CEPA.....	34
Gambar 9.	Submisi kepada NOAA Fisheries AS	36
Gambar 10.	Kegiatan Promosi Usaha dan Investasi.....	39
Gambar 11.	Profil pasar ekspor komoditas udang.....	40
Gambar 12.	Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar	42
Gambar 13.	Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025	44
Gambar 14.	Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025).....	45
Gambar 15.	Pembahasan Juknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan PMMT/HACC	46
Gambar 16.	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha	48
Gambar 17.	On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System.....	52
Gambar 18.	Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional	54
Gambar 19.	Implementasi Fasilitasi Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik	55
Gambar 20.	Pembahasan Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN	56
Gambar 21.	Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB	57
Gambar 22.	Sosialisasi Teknis CDIB untuk Penerbitan SPDI.....	59
Gambar 23.	Kegiatan Safari Gemarikan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat.....	62
Gambar 24.	Rangkaian Hari Ikan Nasional 2025	63

Gambar 25. Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran	64
Gambar 26. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri.....	65
Gambar 27. Workshop Penghitungan AKI Tahun 2024	66
Gambar 28. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG	69
Gambar 29. Penyediaan Peralatan Pemasaran	71
Gambar 30. Surveilans Pertama PT Citraraja Ampat	74
Gambar 31. Produk yang diuji terapkan oleh UMKM penerap	77
Gambar 32. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor KP	84
Gambar 33. Rapat Pembahasan Monitoring Progres Pelaksanaan Kegiatan Prioritas KNMP	89
Gambar 34. Rapat penyusunan LKj Level I dan Level II.....	91
Gambar 35. Rapat verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK)	91
Gambar 36. Rapat rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran.....	92
Gambar 37. Rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra).....	93
Gambar 38. Koordinasi persiapan reviu PIPK Ditjen PDSPKP oleh inspektorat Jenderal KKP	94
Gambar 39. Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP lingkup Ditjen PDSPKP	95
Gambar 40. Pemusnahan Arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	96
Gambar 41. Rapat Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP).....	96
Gambar 42. Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik lingkup Ditjen PDSPKP..	98
Gambar 43. Monev Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PDSPKP	99
Gambar 44. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan	99
Gambar 45. Rapat Penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.	Error! Bookmark not defined. 5
---	---------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Rancangan Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Rancangan Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan Rancangan Renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Tahun 2025 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

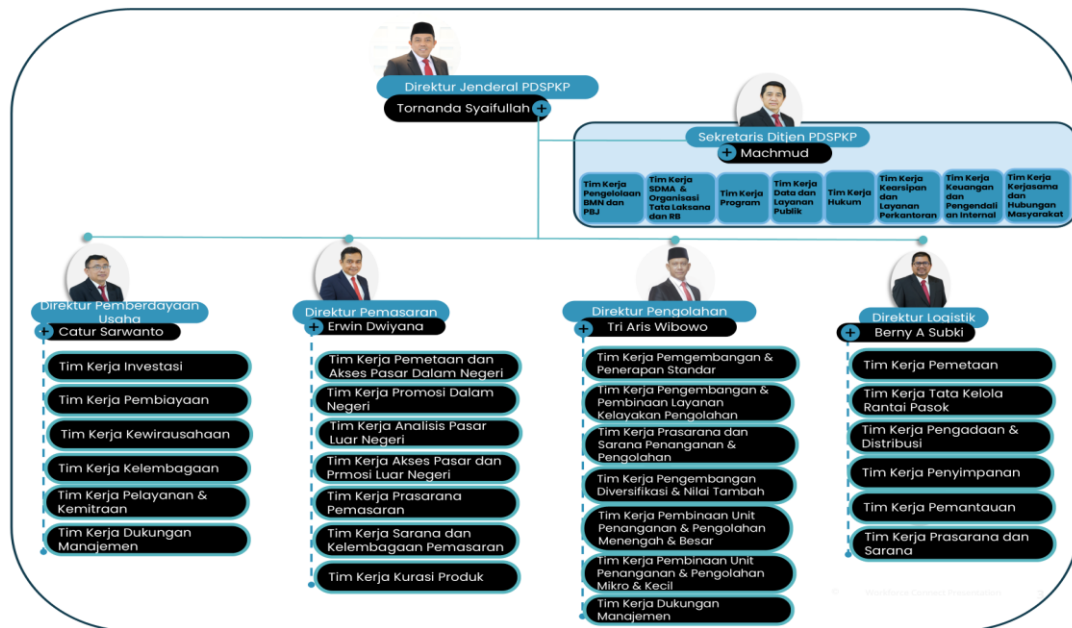
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Prasarana dan Sarana; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan; Direktorat Pemasaran dan Direktorat Akses dan Promosi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;

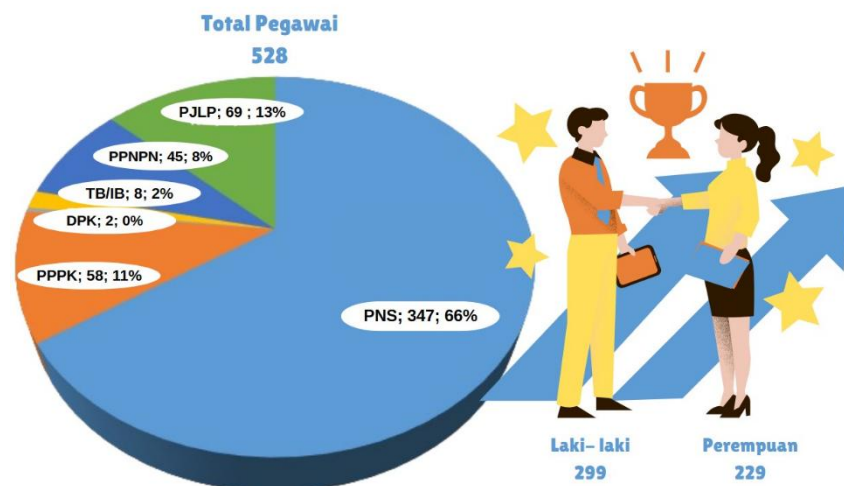
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2025 mencapai 528 orang yang terdiri dari 299 pegawai Laki-laki dan 229 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Keterangan:

Total jumlah pegawai adalah 528 orang, terdiri dari 347 PNS, 58 PPPK, 2 DPK, TV/IB, 45 PPNNP dan 69 PJLP. (299 laki-laki dan 229 Perempuan)

5. Permasalahan Utama

A. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Kedepan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia.

Disparitas yang menonjol berikutnya dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% sebaran UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampaknya, banyak industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku dalam waktu lama yang berakibat pada penghentian aktivitas industri bahkan PHK. Hal itu selalu terjadi setiap tahun, meskipun pada waktu yang sama produksi ikan di Wilayah Indonesia Timur tinggi. Ke depan, hal ini perlu dicari jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan pelaku UPI dan juga nelayan. UPI banyak

dikembangkan di Pulau Jawa lebih karena kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan dapat membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinyu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Namun ternyata sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait konektivitas antar wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka 60-70 (skala 1-100). Hal perlu ditingkatkan antara lain melalui penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerjasama, dan simbiosisitas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan, begitu juga dukungan pemerintah melalui kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik ikan perlu diupayakan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, yang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan,

serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudidaya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk mereka. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intellegent pasar yang membantu diversifikasi pasar produk perikanan dan kelautan. Perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar

mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSPKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

B. Permasalahan dan Tantangan Global

Permintaan global terhadap produk-produk seafood dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2024, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 183,97 miliar, mengalami penurunan 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2020 hingga 2024 sebesar 5,3% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar.

Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,52 miliar, meski pertumbuhannya minus 1,4% (YoY). Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,43 miliar, naik 0,2%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 22,60 miliar dan USD 13,57 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 3,1% dan 5,6% dari tahun sebelumnya (YoY).

Pada tahun 2024, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas salmon dan trout, dengan nilai mencapai USD 37,21 miliar, mencakup 20,2% dari total perdagangan perikanan global, meskipun turun 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 25,90 miliar, menyumbang 14,1%, namun mengalami penurunan sebesar 4,9%. Tuna-

tongkol-cakalang mencatat nilai impor USD 16,22 miliar (8,8% dari total), meningkat 1,9%. Cumi-sotong-gurita mencatat impor USD 11,27 miliar (6,1% dari total), meskipun turun 1,2%. Tepung-pelet ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,8%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 6,19 miliar (3,4%), naik 4,1%. Lobster mencatat impor USD 5,61 miliar (3,0%), dengan kenaikan 10,2%.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Vietnam. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,92 miliar, mencakup 11,2% dari total perdagangan dunia, naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,07 miliar (8,6% dari total) dan mencatat pertumbuhan positif meskipun sangat kecil. Ekuador dan Vietnam masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,24 miliar (5,0%) dan USD 8,82 miliar (4,7%), dengan Ekuador mengalami kenaikan 2,3%, sementara Vietnam turun 7,1%. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan nilai ekspor USD 5,9 miliar, berkontribusi 3,2% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Tahun 2023 Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,85 miliar, meski pertumbuhannya hanya 0,05%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,38 miliar, meski turun 16,23%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 23,32 miliar dan USD 14,37 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,59% dan 9,21% dari tahun sebelumnya (YoY). Pada tahun 2023, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas trout dan salmon, dengan nilai mencapai USD 35,87 miliar, mencakup 19,4% dari total perdagangan perikanan global, dan tumbuh 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 27,00 miliar, menyumbang 14,6%, namun mengalami penurunan sebesar 13,9%. Tuna, tongkol, dan cakalang mencatat nilai impor USD 15,92 miliar (8,6% dari total), dengan penurunan 5,8%. Cumi-cumi, sotong, dan gurita mencatat impor USD 11,44 miliar (6,2% dari total), meskipun turun 2,7%. Tepung dan pakan ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan

0,2%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 5,92 miliar (3,2%), turun 20,6%. Ikan cod mencatat impor USD 5,49 miliar (3,0%), dengan penurunan 9,5%.

Indonesia masih menjadi importir *seafood* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor produk perikanan sekitar 366.791,62 ton. Impor ini mencakup berbagai jenis *seafood*, termasuk ikan segar, beku, dan olahan mulai dari makarel hingga rumput laut. Nilai impor hasil perikanan Indonesia pun bervariasi dengan makarel menjadi komoditas impor terbesar sebesar USD 136,98 juta. Di sisi lain, ikan Cod dan Rumput Laut mencatat nilai impor yang lebih rendah, masing-masing sekitar USD 36,55 juta dan USD 33,96 juta. Udang dan Cumi-Sotong-Gurita memiliki nilai impor paling kecil, masing-masing USD 38,78 juta dan USD 19,93 juta. Komoditas lain seperti Tepung Ikan juga memiliki nilai impor tinggi hingga USD 64,59 juta.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Chili. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,68 miliar, mencakup 11,18% dari total perdagangan dunia, meskipun turun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,05 miliar (8,68% dari total), dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,80%. Ekuador dan Chili masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,04 miliar (4,89%) dan USD 8,89 miliar (4,81%), dengan Ekuador mengalami penurunan 10,72%, sementara Chili tumbuh 1,71%. Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan nilai ekspor USD 5,6 miliar, berkontribusi 3,03% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 30,7% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2023. Meskipun demikian, Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir udang utama dunia,

di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,6%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Preliminary Determination dari United States Department of Commerce (USDOC), Indonesia dinyatakan melakukan tindakan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023. Akibatnya, sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia dikenakan tambahan tarif anti-dumping sementara sebesar 6,3%. Besaran tarif anti-dumping final akan ditetapkan setelah penerbitan *Final Determination* secara resmi oleh USDOC. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,44 juta ton pada tahun 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2024, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,3% atau setara dengan USD 1,01 miliar, masih di bawah Thailand (16,1%), Ekuador (10,1%), Tiongkok (8,9%), dan Spanyol (8,3%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (tariff escalation) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif 4 (empat) post tarif untuk tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada triwulan I tahun 2026. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang bertujuan menurunkan tarif impor

produk perikanan Indonesia termasuk tuna olahan sampai dengan 0% baik secara langsung maupun gradual.

Indonesia juga hanya menempati peringkat keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2024, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 0,87 miliar dengan pangsa pasar 7,1%, berada di bawah Tiongkok (29,5%), Spanyol (10,8%), dan Maroko (8,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-kepiting Indonesia mencapai USD 0,45 miliar dengan pangsa pasar 7,2%, dibawah Rusia (30,9%), Kanada (18,1%), dan Tiongkok (10,3%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 0,34 miliar dan pangsa pasar 11,4%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 23,2% dan Korea Selatan 16,9%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 56,3%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (Cottonii) dan *Eucheuma denticulatum* (Spinsum), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor Dried Eucheuma oleh Tiongkok.

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella* sp., *Listeria* sp., dan *Vibrio* sp. Dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut

masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Hambatan ekspor non tarif lainnya yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah ditemukannya kandungan Radionuklida Cesium 137 (Cs-137) pada produk udang yang di ekspor ke Amerika Serikat, hal ini menjadikan United States Food and Drug Administration (USFDA) menerbitkan import alert untuk udang Indonesia yang berasal dari UPI tertentu, sehingga harus diterbitkan sertifikat tambahan yang menjamin bahwa udang Indonesia bebas kandungan Cs-137 untuk dapat masuk ke pasar Amerika Serikat. Selain isu Cs-137, Indonesia juga harus berhadapan dengan larangan impor masuk ke pasar Uni Eropa untuk produk perikanan budi daya mulai 3 September 2026 berdasarkan EU Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598 terkait larangan penggunaan produk obat antimikroba tertentu. Indonesia harus memastikan bahwa produk budidaya tidak mengandung produk obat antimikroba yang dilarang untuk ekspor ke pasar Uni Eropa.

Disamping itu pada bulan Agustus tahun 2025, Indonesia juga dikenakan tarif resiprokal sebesar 19% termasuk produk perikanan yang di ekspor ke Amerika Serikat. Tambahan tarif bea masuk ini menambahkan tekanan pada daya saing produk perikanan ke Amerika Serikat setelah sebelumnya terkena tarif dumping 3,9%.

Berbagai hambatan ekspor baik tarif dan non tarif di atas dikeluarkan oleh negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pemerintah harus merespon dengan cepat dan tepat dengan menyusun berbagai langkah perbaikan baik yang sifatnya teknis maupun penguatan diplomasi. Pada masa mendatang, hambatan non tarif akan menjadi trade barrier yang lebih dominan, mulai dari isu keamanan pangan, keberlanjutan, konservasi, perlindungan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus memperjuangkan penghapusan atau eliminasi tarif bea masuk melalui berbagai perundingan perdagangan bebas dengan mitra

dagang baik secara bilateral, regional dan multilateral untuk menjadikan daya saing hasil perikanan Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rancangan Rencana Strategis

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025-2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh landasan pemikiran tentang visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan :

- 1) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
- 2) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan

b. Strategi

- 1) Hilirisasi penangkapan ikan berbasis komoditas unggulan
- 2) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
- 3) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
- 5) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 6) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat
- 7) Penguatan pasar luar negeri

Selanjutnya upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah:

- Industrialisasi yang berorientasi pada hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor

- Ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*)

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025-2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dari empat misi KKP tersebut, Ditjen PDSPKP mendukung dua misi, yaitu:

- 1) Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025–2029. Mengacu Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, ada empat tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025–2029, yaitu:

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

Dari empat tujuan tersebut yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri serta usaha pengolahan dan pemasaran. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a) Target Indikator Nilai Ekspor Rumput Laut tahun 2025 sebesar USD 574 juta dan meningkat sebesar USD 898 juta pada tahun 2029;
 - b) Target Indikator Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar dan meningkat sebesar USD 7,60 miliar pada tahun 2029;
 - c) Target Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri tahun 2025 sebesar Rp310,51 triliun dan meningkat sebesar Rp352,01 triliun pada tahun 2029;

- d) Target Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 sebesar 5% dan meningkat sebesar 7% pada tahun 2029.
2. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a) Target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 86 dan meningkat sebesar 88 pada tahun 2029

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

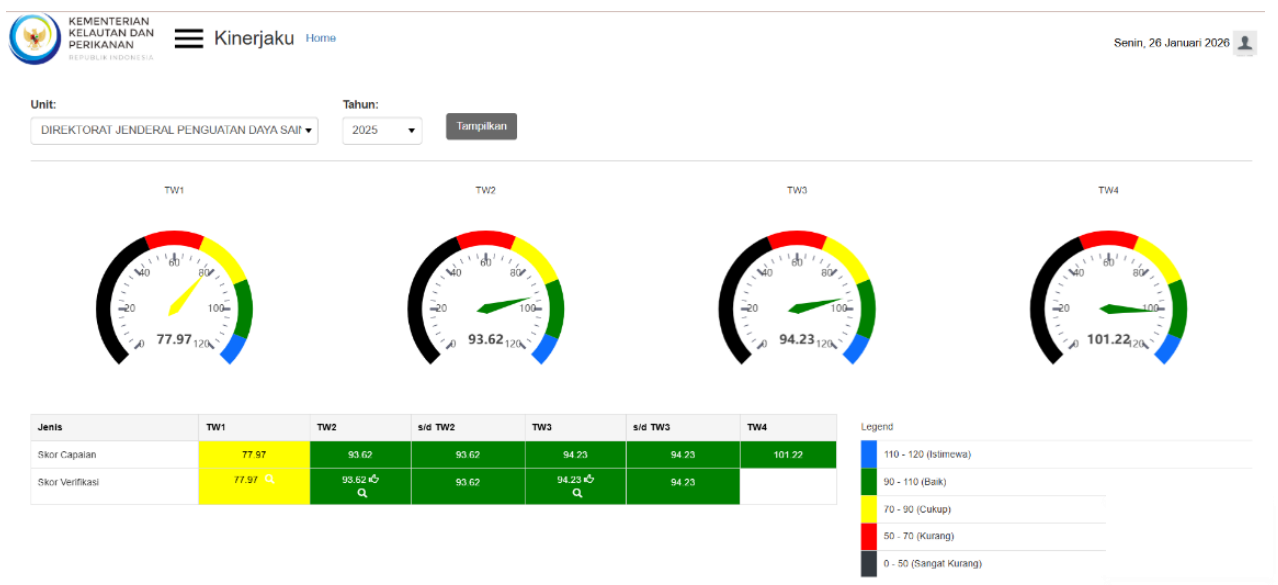
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	574
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,70
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Desember 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP tahun 2025 adalah sebesar 101,22 (Kategori Baik). Capaian NKO pada tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Gambar 6.



Gambar 5. Capaian NKO pada tahun 2025

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW IV 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW IV 2025		Tahun 2025	TW IV 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	574	574	320	55.75	55.75
2	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68	5,68	5,85*	102,99	102,99
3	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51	310,51	335,53	108,06	108,06
4	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5	5	6,02	6,02	120
5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	86	90,84	105,63	105,63

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Nilai Ekspor Rumput Laut

Ekspor rumput laut merupakan kegiatan pengiriman komoditas rumput laut dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial seperti hibah, sumbangan, atau hadiah. Kegiatan ini juga mencakup pengiriman rumput laut untuk diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor rumput laut dihitung berdasarkan total nilai seluruh kode *Harmonized System (HS)* terkait rumput laut sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi S.d 2025*	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN
Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	2025	574	320*	55,75%	898	320*	35,63%

*Prognosa sampai dengan Desember 2025
Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian sampai dengan Desember 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Pendekatan ini digunakan karena terdapat jeda waktu publikasi data ekspor oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar dua bulan yang menjadi sumber utama data resmi ekspor nasional. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa tersebut, nilai ekspor rumput laut hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 319,83 juta (prognosa). Capaian tersebut setara dengan 55,75% terhadap target 2025 sebesar USD 574 juta. Jika dibandingkan dengan target RENSTRA sebesar

USD 898 juta, maka capaian tahun 2025 tersebut setara dengan 35,63% terhadap target RENSTRA. Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RENSTRA 2025-2029.

Hasil perhitungan prognosa hingga bulan Desember tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor rumput laut Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya dinamika harga yang cukup signifikan pada rumput laut kering dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*);
2. Penurunan persentase proporsi olahan rumput laut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-o-y*);
3. Ketergantungan yang tinggi pada satu pasar utama.

Sebagai tindak lanjut atas tidak tercapainya capaian ekspor RL 2025, maka pada Triwulan I Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL). Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman terhadap dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengolahan dan ekspor rumput laut, memfasilitasi pertukaran informasi antara pemangku kepentingan, serta memastikan keselarasan pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk rumput laut di pasar domestik maupun internasional.

Secara komposisi, ekspor rumput laut Indonesia terdiri atas dua kelompok utama, yaitu rumput laut kering dan olahan. Hingga bulan November 2025, nilai ekspor produk olahan rumput laut tercatat menurun sebesar 11,87% (*y-o-y*), dengan persentase proporsi olahan rumput laut mencapai 41,18% dibandingkan di tahun 2024 yang mencapai 43,46%, sedangkan nilai ekspor rumput laut kering turun 3,26% (*y-o-y*) dengan persentase proporsi rumput laut kering mencapai 58,82% dibandingkan di tahun 2024 yang mencapai 56,54%. Hingga bulan November 2025, ekspor rumput laut Indonesia keseluruhan tercatat mengalami

penurunan dari sisi nilai sebesar 7%, sedangkan dari sisi volume tercatat tetap stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun 2025, Tiongkok masih menjadi pasar utama dengan kontribusi lebih dari 69,7% terhadap total nilai ekspor rumput laut Indonesia. Pasar utama Rumput Laut Indonesia selain Tiongkok adalah Uni Eropa USD 30,04 Juta (10,3%), ASEAN USD 9,74 Juta (3,3%), Amerika Serikat USD 9,10 Juta (3,1%) dan Jepang USD 7,36 Juta (2,5%).

Kinerja komoditas rumput laut pada Tahun 2025 menunjukkan ketahanan pasar yang relatif baik, tercermin dari penguatan harga di tingkat produsen. Harga rumput laut kering yang sebelumnya berada pada kisaran Rp18.000,- per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp20.000,- hingga Rp21.000,- per kilogram, atau meningkat sekitar 11,1% hingga 16,7%. Kondisi tersebut mencerminkan penguatan permintaan pasar serta meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang akhir tahun. Penguatan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku dari industri pengolahan dalam negeri dan eksportir, khususnya dalam rangka pemenuhan kontrak penjualan akhir tahun. Peningkatan aktivitas pengamanan pasokan oleh pelaku usaha turut mendorong dinamika permintaan di tingkat hulu dan berdampak langsung terhadap perbaikan harga di tingkat produsen.

Sedangkan berdasarkan hasil kegiatan promosi perdagangan dan pengumpulan intelijen pasar yang telah dilakukan, teridentifikasi adanya perubahan preferensi mitra dagang internasional yang membuka peluang strategis bagi Indonesia. Pelaku usaha global menunjukkan kecenderungan untuk melakukan diversifikasi sumber pasokan bahan baku guna mengurangi ketergantungan terhadap satu negara produsen utama, sehingga Indonesia dipandang memiliki posisi yang cukup strategis sebagai alternatif sumber pasokan yang dapat mendukung penguatan keamanan rantai pasok global.

Selain itu, permintaan pasar Uni Eropa mulai menunjukkan pergeseran ke arah produk dengan spesifikasi teknis tertentu serta berorientasi pada prinsip

keberlanjutan. Sejumlah pelaku usaha, baik *trader* maupun distributor, menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki kerja sama jangka panjang dengan Indonesia sebagai bagian dari strategi diversifikasi mitra dagang yang sejalan dengan dinamika geopolitik perdagangan global. Meskipun prospek pasar menunjukkan tren yang positif, upaya peningkatan ekspor rumput laut ke pasar non-tradisional (khususnya kawasan Uni Eropa), masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Isu konsistensi mutu produk, terutama terkait variasi kualitas antar-produksi, serta faktor daya saing harga dibandingkan dengan negara pesaing masih menjadi perhatian utama calon mitra dagang dan memerlukan langkah penguatan kualitas serta pemenuhan standar teknis secara berkelanjutan.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional

Tahun 2025 telah dilakukan 1 kali promosi produk rumput laut skala internasional. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a) Peningkatan akses pasar di wilayah Asia-Pasifik melalui partisipasi Busan *International Seafood & Fisheries Expo 2025 (BISFE 2025)*.

Pameran *BISFE* merupakan *event* pameran tahunan yang telah rutin dilaksanakan sejak 2008 oleh *Korea Fish Trade Association*. Pameran *BISFE 2025* dilaksanakan di kota Busan, Korea Selatan pada 5-7 November 2025, pameran merupakan *platform* perdagangan produk perikanan yang mempertemukan produsen, *supplier*, distributor dan pembeli dari berbagai negara dari kawasan Asia Pasifik. Pada pameran *BISFE 2025*, pelaku usaha rumput laut memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan ragam produk olahan rumput laut Indonesia dan meningkatkan *brand awareness* produk rumput laut Indonesia di pasar global. Pelaku usaha rumput laut juga berkesempatan memiliki potensi kolaborasi dan jejaring bisnis dengan pelaku industri rumput laut di kawasan Asia Pasifik (APAC).

- b) Peningkatan akses pasar di wilayah Eropa melalui event *Food Ingredients Europe* (FIE).

Keikutsertaan KKP pada Pameran *Food Ingredients Europe* (FIE) 2025 yang diselenggarakan pada 2–4 Desember 2025 di Paris, Perancis, merupakan upaya strategis untuk memperkuat promosi dan citra produk turunan rumput laut Indonesia di pasar global melalui branding “*Indonesia Seaweed; Natural Binding Solutions to the World*”. KKP memfasilitasi Paviliun Indonesia seluas 48 m² dengan partisipasi 6 eksportir nasional yang menampilkan berbagai produk unggulan seperti karaginan, agar, konjac, dan *hydrocolloid blends*. Kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemasok penting bahan pangan fungsional berbasis rumput laut di tengah meningkatnya permintaan pasar Eropa terhadap produk yang berkelanjutan dan berbasis nabati.

- c) Kegiatan *market intelligence* dan *Fi Europe Partner Meeting*.

Bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai *trend* industri, kebutuhan teknis pasar, serta regulasi impor Uni Eropa, termasuk melalui pertemuan dengan 15 pelaku utama industri *food ingredients*. Hasil kegiatan menunjukkan minat kuat dari pembeli Eropa dengan persyaratan utama pada konsistensi pasokan, jaminan mutu, dan harga yang kompetitif. Selama pameran, tercatat potensi transaksi sebesar USD 13,65 juta dengan calon pembeli dari lebih dari 25 negara, yang mencerminkan kontribusi nyata kegiatan ini terhadap perluasan akses pasar, peningkatan peluang ekspor, serta penguatan daya saing produk olahan rumput laut Indonesia.

2. Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

Tahun 2025 telah dilakukan 1 kesepakatan kerjasama pemasaran rumput laut. Dalam upaya perumusan kerjasama pemasaran rumput laut, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pelaku melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 Januari 2025 antara:

- a) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan PT. Agarindo Bogatama dengan nomor 01/PKS/KMAM-ABT.1/2025 dan 01/PKS/ABT-KMAM.1/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut *Gracilaria* spp.
- b) Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan Kelompok Pembudidaya Tunas Makmur dengan nomor 02/PKS/KMAM-ABT.I/2025 dan 01/PKS/KTMKMAM.I/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut



Gambar 6. Fasilitas Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

3. Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut

Tahun 2025 telah dilakukan penumbuhan eksportir produk rumput laut sebanyak 1 industri. Dilakukan melalui fasilitasi promosi dagang dan perluasan jejaring bisnis internasional, yaitu memfasilitasi 6 Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) dalam keikutsertaan pada *Food Ingredients Europe (FIE)* yang diselenggarakan di Paris pada 2–4 Desember 2025, dengan tujuan memperkenalkan produk olahan rumput laut Indonesia serta membuka akses pasar non-tradisional di luar negara tujuan ekspor utama.

Melalui kegiatan tersebut, salah satu UPRL, CV Karagen Indonesia, mempromosikan produk *Semi Refined Kappa* dan *Refined Kappa* yang memperoleh respons positif dari pelaku industri pangan global. Penjajakan bisnis awal berhasil dilakukan dengan calon importir dari Polandia (*Pro Spice*) dan India (*Sarda Gum*), yang menunjukkan potensi penambahan tujuan ekspor baru. Hasil ini menjadi dasar tindak lanjut berupa pendalaman komunikasi bisnis dan pemenuhan persyaratan teknis guna mendorong realisasi ekspor secara bertahap serta memperkuat basis eksportir rumput laut nasional



Gambar 7. Fasilitas promosi dagang dan perluasan jejaring bisnis internasional

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut sebesar Rp832.890.000,- sampai dengan periode tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp832.185.000,- atau setara dengan 99,92%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp705.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,92%.

B. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Komoditas produk perikanan lainnya merupakan hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir berupa ikan segar, ikan beku, serta berbagai produk olahan selain komoditas rumput laut. Ekspor produk perikanan lainnya merupakan kegiatan pengeluaran komoditas tersebut dari wilayah pabean Republik Indonesia (*the customs frontier*), baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial (hibah, sumbangan, atau hadiah) serta produk yang dikirim ke luar negeri untuk diolah lebih lanjut dan hasil olahannya kemudian dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan lainnya dihitung berdasarkan total nilai ekspor seluruh produk perikanan di luar komoditas rumput laut, dengan mengacu pada klasifikasi kode HS (*Harmonized System*) sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi S.d 2025*	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (miliar USD)	2025	5,68	5,85*	102,99%	7,60	5,85*	76,97

*Prognosa sampai dengan Desember 2025
Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Sehubungan dengan adanya jeda waktu publikasi data ekspor selama dua bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber utama data ekspor produk perikanan lainnya, maka Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian hingga Desember 2025 dengan menggunakan data historis (*time series*) dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan prognosa tersebut, nilai ekspor produk perikanan lainnya sampai dengan 2025 diperkirakan mencapai USD 5,85 miliar. Capaian tersebut setara dengan 102,99% terhadap target tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar. Capaian tahun 2025 setara dengan 76,97% terhadap target RENSTRA 2025-2029 sebesar USD 7,60 miliar. Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RENSTRA 2025-2029.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–November, volume ekspor produk perikanan lainnya (tidak termasuk rumput laut) menunjukkan penurunan sebesar 1,55% yaitu dari 1,29 juta ton pada tahun 2024 menjadi 1,27 juta ton pada tahun 2025. Sementara itu, nilai ekspornya meningkat lebih signifikan, yaitu sebesar 4,4%, dari USD 5,38 miliar menjadi USD 5,62 miliar pada periode yang sama. Peningkatan nilai ekspor tersebut terutama didorong oleh tiga komoditas utama, yakni udang, tuna–cakalang dan cumi-sotong-gurita. Ekspor udang mengalami penurunan sebesar 1,0% dalam volume dan 7,1%

dalam nilai, sedangkan ekspor tuna-cakalang meningkat 7,8% dalam volume dan 1,1% dalam nilai, sedangkan untuk ekspor cumi-sotong-gurita menurun 9,8% dalam volume dan 2,7% dalam nilai. Produk udang, tuna-cakalang, dan cumi-sotong-gurita mendominasi ekspor produk perikanan Indonesia dengan mayoritas permintaan berasal dari mitra dagang utama yang menjadi pasar terbesar. Hal ini mencerminkan fokus ekspor Indonesia pada negara tujuan dengan kontribusi signifikan terhadap devisa sektor perikanan.

Negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dengan nilai USD 1,75 miliar (31,2% terhadap total nilai ekspor), Tiongkok sebesar USD 1,10 miliar (19,5%), ASEAN sebesar USD 909,38 juta (16,2%), Jepang sebesar USD 559,14 juta (10,0%) dan Uni Eropa sebesar USD 413,00 juta (7,4%). Dari kelima negara tersebut, tujuan ekspor ke Amerika Serikat, ASEAN, Jepang dan Uni Eropa mengalami peningkatan nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Tiongkok mengalami penurunan. Dari segi volume ekspor, ASEAN dan Uni Eropa mengalami kenaikan namun Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang mengalami penurunan.

Selain dilihat dari persebaran pasar tujuan ekspor, kinerja ekspor produk perikanan lainnya juga dapat ditinjau berdasarkan kontribusi masing-masing komoditas utama yang mendominasi nilai ekspor nasional. Sampai dengan November 2025, nilai ekspor produk perikanan lainnya didominasi oleh empat komoditas utama, yaitu:

1. Udang meliputi Amerika Serikat sebesar USD 982,32 Juta (60,3% dari total nilai ekspor udang Indonesia), diikuti oleh Jepang USD 293,75 juta (18,0%), Tiongkok USD 97,69 juta (6,0%), Uni Eropa USD 70,84 juta (4,3%) dan ASEAN USD 49,64 juta (3,0%). Nilai ekspor udang hingga November 2025 mengalami kenaikan 7,1% dibanding periode yang sama tahun 2024.
2. Tuna-Cakalang meliputi ASEAN sebesar USD 271,62 juta (28,4% dari total nilai ekspor tuna-cakalang Indonesia), diikuti oleh Amerika Serikat USD 185,79 juta (19,4%), Jepang USD 147,51 juta (15,4%), Uni Eropa USD 133,54 juta (14,0%)

dan Timur Tengah USD 93,10 juta (9,7%). Nilai ekspor Indonesia hingga November 2025 mengalami kenaikan 1,1% dibanding periode yang sama tahun 2024.

3. Cumi-Sotong-Gurita meliputi Tiongkok sebesar USD 308,63 juta (39,1% dari total nilai ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia), diikuti oleh ASEAN USD 291,50 juta (37,0%), Uni Eropa USD 65,60 juta (8,3%), Taiwan USD 36,84 juta (4,7%) dan Amerika Serikat USD 27,52 juta (3,5%). Nilai ekspor Indonesia hingga November 2025 mengalami kenaikan 2,7% dibanding periode yang sama tahun 2024.
4. Rajungan-Kepiting meliputi Amerika Serikat sebesar USD 296,69 juta (64,6% dari total nilai ekspor rajungan-kepiting Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 79,55 juta (17,3%), ASEAN USD 29,92 juta (6,5%), Uni Eropa USD 16,63 juta (3,6%) dan Jepang USD 12,50 juta (2,7%). Nilai ekspor Indonesia hingga November 2025 mengalami penurunan 2,9% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri melalui Kertas Posisi Runding.

Tahun 2025 telah dilaksanakan 1 rekomendasi kebijakan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan akses pasar luar negeri melalui kertas posisi runding.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Perkembangan perundingan IEU-CEPA

Perjanjian perdagangan dalam kerangka IEU – CEPA telah ditandatangani pada tanggal 23 September 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, serta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 8 Desember 2025, perwakilan Direktorat Akses dan Promosi

mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Ketentuan Asal Barang dalam Kerangka Indonesia *European Union Comprehensive Economic Partnership* (IEU-CEPA). Kegiatan bertujuan untuk menyiapkan pelaku usaha menghadapi perubahan mekanisme *Registered Exporter System for the EU Generalized System of Preferences* (REX-GSP) ke IEU-CEPA mulai 1 Januari 2027, terkait *Rules of Origin* (ROO) dan *Product Specific Rules* (PSR).

DJPDSPKP telah melakukan analisis terhadap *final offer* Uni Eropa terhadap produk perikanan. Berdasarkan hasil pencermatan tarif yang diperoleh Indonesia terhadap potensi pemanfaatan IEU-CEPA berdasarkan data perdagangan 2015 – 2023.



Gambar 8. Menghadiri FGD Ketentuan Asal Barang dalam I-EU CEPA

b. Perkembangan Pembahasan Indonesia-Turkiye PTA:

Pada tanggal 12 Februari 2025, Presiden Turki telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan memimpin Pertemuan Pertama *High-Level Strategic Cooperation Council* (HLSC) bersama Presiden RI. Sejalan dengan aspirasi para Pemimpin kedua negara untuk meningkatkan perdagangan Indonesia-Turki hingga USD 10 miliar, Menteri Perdagangan kedua negara telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Enhancing Cooperation in the Fields of Trade and Investment* sebagai penguatan kerja sama ekonomi bilateral. Dalam *Joint Statement* kedua Presiden dan *MoU* antar Menteri dimaksud kedua negara sepakat untuk mengembangkan skema kerja sama perdagangan preferensial dalam bentuk Indonesia-Turkiye *Preferential Trade*

Agreement (IT-PTA), dengan target penyelesaian pada tahun 2026 sebagai langkah awal menuju Indonesia-Turkiye *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA).

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Indonesia dan Turki telah melakukan pertukaran data perdagangan pada bulan Juli 2025. Rapat penajaman *timeline* dan cakupan IT-PTA kemudian telah dilaksanakan pada 25 September 2025. Saat ini, kedua negara tengah membahas konsep *Terms of Reference* (ToR) IT-PTA yang disusun oleh Turki.

Sehubungan dengan hal tersebut, KKP telah menyampaikan kertas posisi kepada Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data BPS, ekspor produk perikanan Indonesia ke Turki tahun 2024 mencapai USD 5,94 juta dengan total volume ekspor 2,29 ribu ton dengan komoditas utama antara lain tuna, binatang melata, ikan hias, rumput laut, dan sarden. Bentuk produk yang diekspor berupa beku, fillet, jangat dan kulit, ikan hidup, dan karagenan. Sedangkan angka ekspor produk perikanan Turki ke Indonesia tahun 2024 mencapai USD 1 juta dengan salmon dan *trout* sebagai produk utama.
2. Ekspor produk perikanan Indonesia ke Turki menghadapi tantangan Tarif Bea Masuk (TBM) yang tinggi sampai dengan 80%. Selain TBM, juga menerapkan *Additional Financial Liability* kepada produk perikanan sampai dengan 35%. KKP melihat hal ini sebagai hambatan akses masuk produk perikanan Indonesia, sehingga IT-PTA diharapkan dapat memberikan liberalisasi tarif yang menguntungkan posisi Indonesia.
- c. Fasilitasi Penanganan Hambatan Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Amerika Serikat.

Sehubungan dengan implementasi ketentuan impor *Marine Mammal Protection Act* (MMPA), yang diberlakukan oleh Pemerintah

Amerika Serikat (AS) mulai tanggal 1 Januari 2026, NOAA Fisheries AS telah mengumumkan hasil *comparability finding* Indonesia yang salah satu hasilnya yaitu melarang ekspor komoditas perikanan yang menggunakan alat tangkap gillnet dan *trammel net*. Untuk komoditas lain yang diidentifikasi oleh AS menggunakan kode HS yang sama (baik hasil tangkapan maupun budidaya), maka diperbolehkan ekspor dengan syarat melampirkan *Certificate of Admissibility* (COA).

Pada tanggal 31 Oktober 2025, Direktorat Akses dan Promosi telah melakukan submisi kepada NOAA Fisheries AS perihal daftar penandatanganan COA yang dikeluarkan oleh DJPT (untuk produk perikanan tangkap) dan BPPMHKP (untuk perikanan budidaya). Pada tanggal 13 November 2025, DJPDS, bersama DJPT dan BPPMHKP juga telah menyelenggarakan sosialisasi persyaratan ekspor COA kepada para asosiasi perikanan, eksportir produk perikanan ke AS. Diharapkan para eksportir/pelaku usaha yang melakukan ekspor produk perikanan dapat segera mengurus COA dan tidak mengalami hambatan masuk pasar AS.



Gambar 9. Submisi kepada NOAA Fisheries AS

- 2) Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
Meningkatkan eksposur, citra, dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global guna memperluas akses pasar dan meningkatkan kinerja ekspor. Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan 1 promosi skala internasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Keikutsertaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Pameran Perikanan Skala Internasional *International Indonesia Seafood & Meat*

Expo (IISM) 2025 tanggal 7 – 10 Mei 2025 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Merupakan pelopor pameran produk perikanan dan daging yang diselenggarakan oleh PT. Wahana Kemalaniaga Makmur (WAKENI) yang fokus pada B2B (*Business to Business*) untuk untuk mendorong pertumbuhan produk ekspor dan memperluas pasar ekspor. Guna mempromosikan dan memperkuat citra (*brand*) komoditi seafood Indonesia, serta mendukung upaya peningkatan nilai ekspor perikanan Indonesia, KKP bekerja sama dengan WAKENI memfasilitasi Paviliun Indonesia *Seafood* seluas 90 m2 untuk 3 (tiga) asosiasi yang mewakili *cobrand Indonesian Shrimp, Indonesian Tuna, Indonesian Pangasius* serta 5 (lima) perusahaan eksportir. Selain itu, *Paviliun Indonesia Seafood* juga membuka pelayanan informasi kebijakan yang diisi oleh Eselon I lingkup KKP. Produk perikanan yang dipamerkan adalah tuna, udang, pangasius, teripang, gelembung renang, sirip hiu kering, ikan kaleng, olahan ikan, dan bandeng isi. Capaian nilai potensi transaksi *Paviliun Indonesia Seafood* selama 4 (empat) hari pameran berlangsung sebesar Rp 18,9 Milyar atau USD 1,15 Juta dengan komoditas yang diminati yaitu tuna, udang, pangasius, teripang, gelembung renang, tuna kaleng dan olahan ikan lainnya. Pembeli potensial berasal dari Malaysia, Mauritius, Singapura, Tiongkok, Indonesia, Thailand, Taiwan dan Kamboja. Pada pameran tersebut juga tercatat transaksi riil *onsite* mencapai Rp100 Juta. Pada rangkaian kegiatan pameran, KKP juga menyelenggarakan kegiatan *Side Event Business Matching* guna meningkatkan akses pasar dalam negeri yang diikuti oleh pelaku usaha dan asosiasi (SCI, APCI, AP5I) dengan calon mitra (APJI, IPI, APRINDO, PPJI, Ditjen PAS, Kemendikbudristek). Beberapa calon mitra berminat untuk bekerja sama dan akan melakukan diskusi B2B lebih lanjut.

3) Penumbuhan Eksportir Kelautan Perikanan Baru

Dalam rangka penumbuhan eksportir baru sektor perikanan, serta mengurangi hambatan administratif dan teknis yang dihadapi oleh Eksportir/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam mengakses pasar Jepang, sekaligus memanfaatkan fasilitas tarif preferensi 0% untuk kode HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 dalam kerangka Indonesia–*Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) yang mulai berlaku pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan dua (2) kegiatan rapat teknis sebagai berikut:

- a) Rapat Penyusunan Pedoman Administrasi Pendaftaran IJ-EPA. Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026 dan difokuskan pada penyusunan pedoman administrasi pendaftaran bagi Eksportir/UPI produk tuna–cakalang yang akan memanfaatkan fasilitas tarif preferensi 0% dalam kerangka IJ-EPA. Pada kegiatan ini telah disusun dan disepakati Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Eksportir/UPI Tuna–Cakalang yang menetapkan persyaratan teknis dan administratif secara terstandar;
- b) Rapat penyusunan SOP Inspeksi Eksportir/UPI ke Jepang. Rapat penyusunan SOP inspeksi Eksportir/UPI yang mengajukan permohonan ekspor ke Jepang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun panduan penilaian terkait kesiapan UPI calon eksportir dalam mengekspor produk perikanan tuna, cakalang ke pasar Jepang, khususnya untuk komoditas cakalang dipersyaratkan dengan ketentuan ukuran bahan baku yang harus berada di atas 30 cm sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh protokol IJ-EPA.

4) Pelaksanaan Promosi Usaha dan Investasi KP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025

antara lain promosi usaha dan investasi KP melalui *Investment and Business Matching* dan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Tual melalui media sosial.

Pada kegiatan *Investment and Business Matching* 2025, KKP memfasilitasi instansi dan pelaku usaha untuk melakukan promosi potensi dan peluang investasi kepada calon investor dengan total nilai yang ditawarkan mencapai Rp3,02 Triliun, terdiri dari 36 proyek diantaranya yaitu Pembangunan Industri Pengolahan Ikan Tuna, Udang, serta Logistik Rantai Dingin oleh Pemda Kabupaten Cilacap; Pembangunan Pabrik Garam Industri oleh Pemda Kabupaten Jeneponto; Pembangunan Fasilitas Pengolahan Hasil Perikanan dan Pusat Logistik Rantai Dingin oleh Direktur Kawasan Industri Bolok - NTT; dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut Berbasis Nori oleh Direktur PT Karya Noribet Indonesia;

KKP memfasilitasi kegiatan one on one meeting (business matching), dengan minat kerja sama investasi dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp1,60 Triliun. KKP juga memfasilitasi pelayanan perizinan berusaha lingkup KKP bagi peserta *Investment and Business Matching* 2025.



Gambar 10. Kegiatan Promosi Usaha dan Investasi

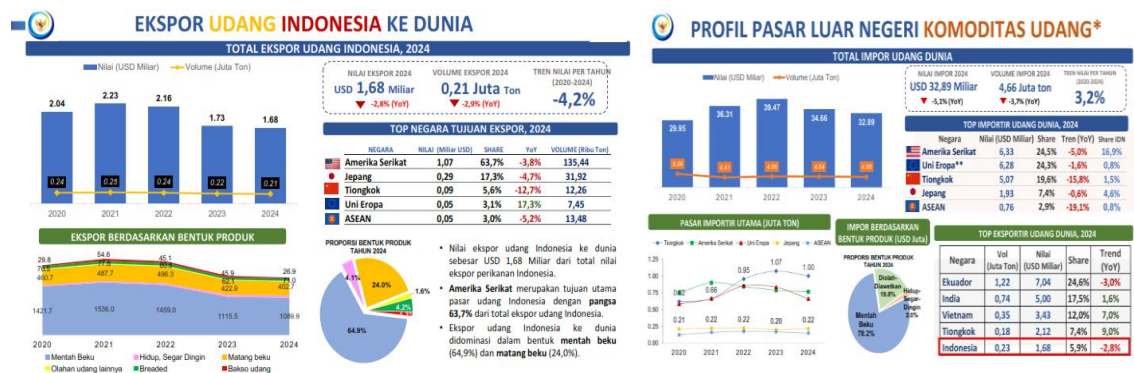
5) Penyusunan Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan adalah untuk menyediakan dasar informasi yang komprehensif dan strategis guna mendukung peningkatan kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan. Tahun 2025 telah disusun 1 profil pasar ekspor hasil kelautan

dan perikanan. Adapun profil pasar komoditas prioritas sebagai salah satu bahan pertimbangan perumusan kebijakan penguatan daya saing produk perikanan.

Pasar udang dunia tahun 2024 sebesar USD 32,89 miliar dengan pasar utama adalah Amerika Serikat (24,5%), Uni Eropa (24,3%), Tiongkok (19,6%), Jepang (7,4%), dan ASEAN (2,9%). Eksportir utama udang dunia didominasi Ekuador (24,6%), India (17,5%), Vietnam (12,0%), dan Tiongkok (7,4%), sementara Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan pangsa 5,9%. Ekspor udang Indonesia masih terkonsentrasi pada sedikit pasar. Ekspor udang Indonesia tahun 2024 turun 2,8% (YoY), yang utamanya dikarenakan penurunan ekspor ke negara utama tujuan ekspor yaitu AS, Jepang, Tiongkok dan ASEAN yang berkontribusi hampir mencapai 90% dari total ekspor udang Indonesia.

Ekspor udang Indonesia periode Januari-Oktober 2025 mencapai USD 1,48 Miliar atau tumbuh 8,6% (YoY). Pada periode ini, ekspor ke seluruh negara tujuan utama meningkat dimana Uni Eropa mencatat kenaikan tertinggi hingga 56,0% (YoY).



Gambar 11. Profil pasar ekspor komoditas udang

6) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas

Tahun 2025 telah dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis neraca komoditas. Kinerja realisasi impor hasil perikanan melalui mekanisme Neraca Komoditas berdasarkan data

Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) per 15 September 2025 sebesar 62.881 ton, atau 80% dari persetujuan Rencana Kebutuhan Impor (RKI) pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 24 Juli 2025 sebesar 78.855 ton, sehingga masih tersedia sisa alokasi RKI sebesar 15.973 ton.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Kemenko Pangan pada Rabu, 3 Desember 2025 dengan agenda persiapan penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026. Dalam kesempatan pertemuan, KKP telah menyampaikan data rencana pasokan dan rencana kebutuhan nasional hasil perikanan melalui SINAS NK (Sistem Nasional Neraca Komoditas), serta rancangan usulan Rencana Kebutuhan Impor (RKI) sementara Tahun 2026 sebesar 58.450 ton, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Kebutuhan Impor Tahun 2026

No	Jenis Penggunaan	Usulan RKI 2026 (ton)
1.	Pemindangan	50.000
2.	Hotel/Restoran/Katering/Pasar Modern	7.000
3.	Pelumatan daging	900
4.	Pereduksian/Ekstraksi/Pengayaan Makanan	230
5.	Umpan	300
6.	Penggunaan lainnya	20

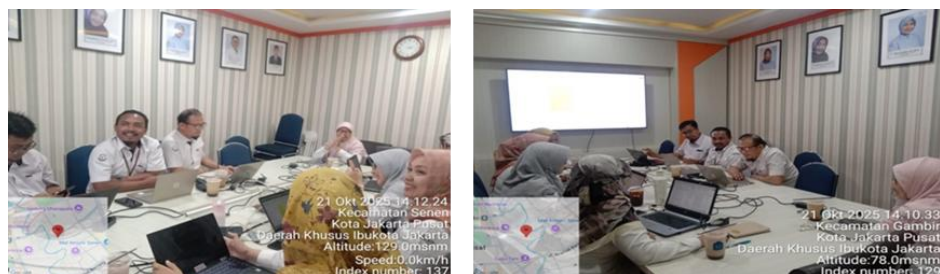
7) Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Tujuannya adalah penyusunan profil industri pengolahan hasil perikanan berupa perhitungan volume produk olahan dan utilitas industri pengolahan produk KP. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 dan 21 Oktober 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Gedung Mina Bahari III Lantai 12a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dihadiri Perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP dan Anggota Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas progres hasil *cleansing* data VPO MB triwulan 1 dan 2 karena adanya anomali data serta progres hasil *cleansing* VPO triwulan 3 yang bersumber dari data lalu lintas Badan Karantina Indonesia. Penghitungan VPO UPI MB dilakukan setiap triwulan menggunakan data lalu lintas domestik dan ekspor dari Badan Karantina Indonesia (BKI) dan BPPMHKP KKP.

Hasil triwulan 1 dan 2 masih dalam proses *cleansing* karena adanya anomali data, sementara triwulan 3 telah tersedia data lalu lintas domestik, ekspor, dan pengiriman rumput laut. Untuk mengatasi anomali, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BKI melalui rapat khusus membahas data lalu lintas domestik dan ekspor. Tahap perhitungan bersama yang dilakukan masih berfokus pada pemetaan produk/komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan olahan. Perhitungan Volume Produk Olahan (VPO) pada Unit Pengolahan Ikan skala menengah besar (UPI MB) untuk triwulan III telah dilaksanakan, dengan fokus utama pada pemetaan produk dan komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan olahan. Dalam proses ini, telah tersedia data lalu lintas dari Badan Karantina Indonesia, meliputi data domestik, ekspor, dan pengiriman rumput laut, serta data ekspor dari BBPMHKP KKP sebagai acuan perhitungan.



Gambar 12. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar

b. Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan Direktorat Pengolahan, dihadiri anggota Tim Analisis yang berasal dari BPS, BKI, BPPMHKP dan Setditjen PDSPKP, perwakilan Timja Pembinaan Pengolahan Hasil serta anggota Timja Pemetaan dan Analisis Pengolahan Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas hasil penghitungan sementara, mendapatkan gambaran untuk analisis awal atas hasil penghitungan sementara VPO UPI MB TW II Tahun 2025 serta review terhadap metode penghitungan yang dilakukan. Rapat koordinasi membahas penghitungan sementara VPO UPI MB TW II Tahun 2025 sebesar 956.162.032 kg setara produk, dengan trend penurunan di bulan 2 dan kenaikan di bulan 3, serta meninjau metode penghitungan yang digunakan. Diskusi menekankan perlunya data lalu lintas ekspor dari BPPMHKP setiap triwulan, potensi kerjasama untuk mendapatkan data kapasitas UPI MB, serta pendalaman data lalu lintas domestik terutama pada penanganan ikan segar, pengolahan rumput laut, pembekuan, dan pendinginan/pengesan ikan yang meningkat signifikan dibanding 2 tahun terakhir. Metode penghitungan tetap memasukkan produk antara dan pelaku usaha perorangan dengan transaksi di atas 10 ton. Tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu analisis lebih mendalam terhadap tren bulanan VPO, pendalaman pengolahan data domestik untuk mendekati trend tahunan, pengusulan forum data lintas Direktorat di Ditjen PDSPKP, serta penyelesaian angka VPO hingga TW III dan prognosa TW IV pada akhir 2025.



Gambar 13. Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025

c. Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 secara Luring di Ruang Pembinaan Hasil Kelautan dan Perikanan, Lantai 12 A, Gedung Mina Bahari III. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Penanganan dan Pengolahan Hasil dan dihadiri oleh Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Pusat Data dan Statistik Setjen KKP, serta Tenaga Ahli dari akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyepakati sumber data, penanggung jawab, serta alur pengolahan data yang akan digunakan dalam penyusunan prognosa VPO IMK Tahun 2025 dan laporan pendukung lainnya. Dengan adanya koordinasi antara Tim Kerja Data, Direktorat Pengolahan, Pusat Data dan Statistik Setjen KKP, serta Tenaga Ahli dari akademisi, diharapkan hasil prognosa dan laporan yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang akurat dan kredibel dalam pengambilan kebijakan ke depan.



Gambar 14. Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025)

d. *Profiling Food Loss and Waste* pada Unit Pengolahan Ikan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Data Direktorat Pengolahan dan dihadiri anggota Timja serta anggota Tim Analisis dari IPB University. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas rencana substansi pada analisis atas hasil penghitungan VPO UPI MB Tahun 2025. Diskusi menekankan analisis awal terhadap lonjakan VPO bulan Maret terkait peningkatan penangkapan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Analisis akan menyandingkan data produksi hulu per bulan dengan data olahan untuk melihat tren dominan per jenis produk dan menghitung persentase serapan bahan baku industri pengolahan dibandingkan produksi tangkap dan budidaya. Tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup penghitungan lanjutan VPO dan utilitas UPI MB tahun 2025 serta FGD terhadap hasil analisis dan penghitungan VPO hingga Triwulan III, dengan melibatkan Direktorat Pemasaran dan Setditjen PDSPKP.

8) **Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong Unit Pengolahan Ikan (UPI) menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau pembinaan lapangan. Sebanyak 628 industri pengolahan telah dibina dalam rangka menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau

sistem HACCP guna memperkuat daya saing industri pengolahan produk kelautan dan perikanan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a) Pembahasan Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical and Control Point* (PMMT/HACCP)

Rapat penyelenggaraan pembahasan juknis Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical and Control Point* (PMMT/HACCP) dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober, 23 Oktober, 30 Oktober, 4 November, 14 November, 20 November, 27 November, dan 5 Desember 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Kesimpulan Rapat pembahasan juknis dilakukan untuk menyusun petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat



Gambar 15. Pembahasan Juknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan PMMT/HACC

- b) Bimtek Penerapan Kelayakan Pengolahan Bagi pelaku Usaha

Kegiatan dilaksanakan pada 4 Desember 2025 secara daring. Bimbingan teknis dibuka oleh Direktur Pengolahan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pemberdayaan Usaha. Kegiatan dihadiri oleh peserta yang merupakan pelaku usaha berjumlah 60 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan,

dan keterampilan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip kelayakan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar sanitasi dan higiene, serta menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan agar berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

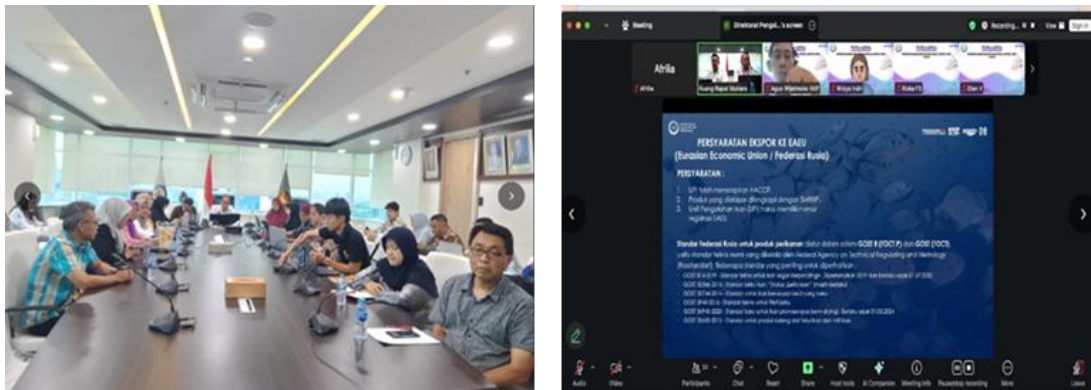
Kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai penerapan kelayakan pengolahan, prosedur permohonan serta perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta penyusunan panduan mutu GMP dan SSOP. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang berkembang terkait kendala teknis di lapangan, khususnya pada UPI skala mikro dan kecil. Sebagai tindak lanjut, beberapa UPI terpilih akan diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP guna meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara berkelanjutan.

c) Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025 secara luring di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III Lantai 14 DKI Jakarta. Kegiatan Bimtek Penerapan Sistem HACCP bagi Pelaku Usaha dibuka oleh Plt. Dirjen PDSPKP (via online) dan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Direktur Pemberdayaan Usaha (via online), National Chief Technical Advisor GQSP yang diwakilkan oleh ibu drh. Novia Priyana, Narasumber dari Pusat Mutu Pasca Panen - BPPMHKP, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan 20 peserta pelaku usaha pengolahan perikanan wilayah jabodetabek. Tujuan pelaksanaan adalah untuk meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku usaha dalam penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Pelaku

usaha memahami penyusunan Manual HACCP, Pelaku usaha memahami proses pengajuan Sertifikasi HACCP.

Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP bagi 20 pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan wilayah Jabodetabek telah berjalan dengan baik dan sesuai agenda. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai penerapan HACCP, penyusunan Manual HACCP, serta proses Sertifikasi HACCP. Sebagai tindak lanjut, peserta akan menyusun Profil UPI dan Manual HACCP dengan pendampingan Pembina Mutu untuk mendukung percepatan penerbitan Sertifikat HACCP.



Gambar 16. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha

9) Fasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran

Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan dan kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha pada subsektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan guna mendukung iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Pada tahun 2025, telah dilakukan fasilitasi sebanyak 21 pelaku usaha. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain adala Rapat verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dimana selama periode tersebut telah diterbitkan 23 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 21 pelaku usaha yang bermohon dengan rincian 8 (delapan)

Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 15 (lima belas) Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.

10) Implementasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) oleh Pelaku Usaha

Tujuan kegiatan ini adalah mendorong penerapan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) oleh pelaku usaha untuk mewujudkan ketertelusuran, transparansi, dan efisiensi rantai pasok hasil kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar. Pada tahun 2025 sebanyak 36 pelaku usaha dari 132 pelaku usaha yang telah menerapkan sistem ketertelusuran. Implementasi STELINA dilakukan melalui beberapa kegiatan selama tahun 2025 antara lain :

a. Technical Meeting STELINA menuju standar *Global Dialogue on Seafood Traceability* (GDST)

Kegiatan pemantauan dan pembahasan perbaikan aplikasi STELINA dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi serta melakukan perbaikan *scripting* aplikasi STELINA guna memenuhi persyaratan *capability test* sesuai standar *Global Dialogue on Seafood Traceability* (GDST).

Dalam pelaksanaannya, aplikasi STELINA telah mengikuti *capability test* sebanyak 143 kali dari total 2.000 kali percobaan yang difasilitasi oleh GDST. Meskipun demikian, masih ditemukan *system error* dan *completeness error*. Hasil pembahasan dan simulasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian kodifikasi pada *instance-level master data* (ILMD), khususnya terkait penetapan kode yang belum sepenuhnya mengacu pada standar GDST. Selain itu, ditemukan pula beberapa

master data yang belum tersedia serta diperlukan penyempurnaan *scripting* pada beberapa bagian sistem.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan perbaikan sistem dan pelaksanaan *capability test* ulang. Pada percobaan ke-146, aplikasi STELINA dinyatakan lulus (*passed*) dan memenuhi standar GDST. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja sistem ketertelusuran produk perikanan berbasis digital.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan konfirmasi melalui wawancara (*interview*) dengan pihak GDST terhadap data dan *event* yang terdapat dalam aplikasi STELINA sebagai proses akhir untuk memperoleh status “GDST *Capable*”, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing dan ketertelusuran produk perikanan nasional.

b. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Bimbingan teknis (Bimtek) akses dan pengisian aplikasi STELINA dilaksanakan pada 15–16 Juli 2025 dan diikuti oleh perwakilan pelaku usaha perikanan dari 21 perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara registrasi dan penginputan data ketertelusuran pada aplikasi STELINA serta mengidentifikasi kendala pelaku usaha dalam implementasi sistem.

Pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh penerapan STELINA secara *mandatory* sesuai Permen KP Nomor 32 Tahun 2024. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan menu utama STELINA, pengisian dan pemutakhiran data profil usaha, penyusunan direktori pemasok dan pembeli, pengelolaan transaksi dan inventori, serta pemanfaatan fitur unggah data. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan sistem ketertelusuran produk perikanan.

c. *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)*

Kegiatan *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System (STELINA)* dilaksanakan pada tanggal 11–13 November 2025 di Hotel Platinum Surabaya dengan dukungan SEAFDEC dan JICA sebagai bagian dari program *capacity building* dalam upaya penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat sosialisasi dan penerapan STELINA serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya ketertelusuran produk perikanan dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan nasional ketertelusuran produk perikanan, kewajiban implementasi STELINA sesuai Permen KP Nomor 32 Tahun 2024, keamanan dan kerahasiaan data, integrasi STELINA dengan sistem lain, serta praktik langsung penginputan data transaksi oleh pelaku usaha. STELINA juga disampaikan telah memenuhi standar global *Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)* sehingga berpotensi meningkatkan akses pasar ekspor produk perikanan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap implementasi STELINA, serta diperoleh masukan terkait pengembangan fitur dan penyempurnaan teknis aplikasi. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan daring, pengembangan aplikasi STELINA sesuai masukan pelaku usaha dan standar GDST, serta koordinasi lanjutan dengan mitra GDST pada tahun 2026.



Gambar 17. *On-Site Training on the Implementation of National Fish Traceability and Logistics System*

11) Penyusunan Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi komprehensif dan terintegrasi mengenai database gudang beku secara nasional sebagai dasar perencanaan kebijakan penguatan logistik dan stabilisasi pasokan ikan. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional

Dilaksanakan pada tanggal Rabu, 27 Agustus 2025 dan bertujuan untuk membahas pembaruan database gudang beku nasional, Agenda kegiatan meliputi pembaruan database gudang beku nasional, pengajuan usulan melalui Satu Peta, tindak lanjut kontrol kualitas data, evaluasi sebaran gudang beku per provinsi, dan rencana penayangan profil sebaran gudang beku pada Portaldata.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan database gudang beku nasional telah dilaksanakan pada periode April–Juli 2025 melalui proses verifikasi langsung dan *ground truth* kepada pelaku usaha gudang beku. Telah melengkapi dokumen pendukung dan mengunggah permohonan kontrol kualitas data ke Setditjen PDSPKP melalui Satu Peta. Proses kontrol kualitas dimulai pada 14 Agustus 2025, dilanjutkan dengan

perbaikan data dan pengunggahan ulang pada 15 Agustus 2025, serta hingga saat ini masih dalam tahap penelaahan oleh Setditjen PDSPKP selaku Unit Data Eselon (UDE).

Berdasarkan hasil evaluasi, total gudang beku nasional tercatat sebanyak 2.287 unit dengan kapasitas 899.178 ton, yang terdiri atas 2.035 unit (89%) milik swasta dan 252 unit (11%) milik pemerintah. Sebaran gudang beku terdapat di seluruh provinsi dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Penayangan data sebaran pada Portaldata ditargetkan pada akhir Agustus 2025, dengan catatan menunggu finalisasi hasil kontrol kualitas.

Dalam diskusi, UDE menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 250 titik koordinat yang belum sesuai, terutama terkait ketidaksesuaian tata ruang dan administrasi wilayah kabupaten. Namun demikian, *database* gudang beku saat ini telah memenuhi karakteristik database yang baik, yaitu bersifat *time series*, lengkap, dan akurat, dengan cakupan verifikasi lebih dari 2.000 data. Setelah proses penjaminan kualitas selesai, data akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori akses, yaitu publik, tertutup, internal, dan terbatas. Kelengkapan database memungkinkan pengembangan tiga jenis peta sebaran, yakni peta sebaran gudang beku nasional, peta gudang beku yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG), serta peta gudang beku yang menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS), dengan atribut utama berupa nama gudang, alamat, jenis gudang, dan kapasitas ABF.

Kesimpulan Kegiatan ini menegaskan bahwa proses pembaruan database telah selesai, sementara kontrol kualitas masih berlangsung dan menjadi faktor kunci penayangan data sesuai target. Selain itu, distribusi gudang beku nasional masih didominasi oleh kepemilikan swasta, sedangkan porsi pemerintah relatif terbatas.



Gambar 18. Pembahasan Pembaruan dan Kontrol Kualitas Database Gudang Beku Nasional

12) Pelaksanaan Kemitraan dalam rangka Pengadaan, Distribusi dan Penyimpanan

Tujuan kegiatan ini yaitu mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengadaan, distribusi, dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan, efisiensi logistik, dan stabilitas harga. Pada tahun 2025 telah dilakukan 11 kesepakatan antara pelaku usaha dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Implementasi Fasilitasi Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik

Implementasi fasilitasi kemudahan layanan distribusi produk kelautan dan perikanan dilaksanakan pada 10 Desember 2025 bertempat di CV Bening Jati Anugrah, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan Direktorat Prasarana dan Sarana, PT KAI Logistik, serta pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi produk UMKM melalui pemanfaatan moda transportasi kereta api logistik serta memperkuat kolaborasi antara KKP, KAI Logistik, dan pelaku usaha dalam rangka penguatan sistem logistik perikanan.

Kegiatan ini merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama KKP–KAI Logistik tentang peningkatan akses transportasi dan distribusi hasil kelautan dan perikanan serta mendukung Program UMKM Naik Kelas melalui penyediaan layanan distribusi yang efisien dan terintegrasi secara digital. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pendampingan pengemasan,

proses serah terima, serta pengiriman produk perikanan menggunakan kereta api logistik hingga tahap distribusi lanjutan.

Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses layanan distribusi berupa tarif khusus serta sistem logistik terintegrasi melalui aplikasi SPARTAN dan TRAX. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan optimalisasi integrasi sistem, perluasan titik layanan kereta api logistik, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mendukung efektivitas dan daya saing distribusi produk kelautan dan perikanan.



Gambar 19. Implementasi Fasilitas Kemudahan Layanan Distribusi Produk Kelautan dan Perikanan melalui Kereta Api Logistik

13) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok

Tujuannya adalah menyusun rekomendasi kebijakan tata kelola rantai pasok hasil kelautan dan perikanan, dimana tahun 2025 berupa Rancangan Perpres Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dilaksanakan pada 22 Desember 2025 secara luring dan daring, bertempat

di Ruang Rapat Kantin VIP GMB II KKP. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Inspektorat IV Itjen KP, serta unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

Pembahasan RPerpres SLIN dilakukan dalam rangka penguatan pelaksanaan Permen KP Nomor 58 Tahun 2021 tentang SLIN serta pelaksanaan mandat Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. RPerpres ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri hasil perikanan dan konsumsi ikan masyarakat yang bermutu dan aman, serta memperkuat dukungan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan logistik ikan secara nasional.

RPerpres SLIN memuat penguatan pengelolaan logistik ikan secara nasional, pengembangan sistem informasi logistik, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan rantai dingin, ketertelusuran produk, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah masukan disampaikan untuk penyempurnaan rencana aksi, antara lain penguatan moda transportasi, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, penyusunan indikator kinerja yang terukur, sinkronisasi regulasi terkait, serta penguatan koordinasi lintas instansi.



Gambar 20. Pembahasan Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN

14) Pembinaan Pelaku Usaha dalam rangka Penguatan Sistem Logistik

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan dalam rangka penguatan sistem logistik ikan antara lain seperti

penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB). Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 65 pelaku usaha dalam rangka penguatan sistem logistik. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB

Kegiatan pembahasan penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan secara *hybrid* pada 10 Oktober 2025 di Balai Uji Standar KIPM. Kegiatan ini melibatkan unit kerja terkait di lingkungan KKP, asosiasi ikan hias, serta pelaku usaha sebagai upaya penyusunan standar penanganan ikan hias yang sesuai dengan karakteristik teknis dan biosekuriti.

Hasil pembahasan menghasilkan kesepahaman terkait ruang lingkup CDIB ikan hias yang mencakup persyaratan teknis penanganan dan pengangkutan, kewajiban Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) berdasarkan skala usaha, serta kejelasan penerapan CDIB pada KBLI terkait. Selain itu, diidentifikasi potensi irisan antara SPDI dan CKIB sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antarinstansi melalui mekanisme *mutual recognition* atau *joint inspection*.



Gambar 21. Pembahasan Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penanganan Ikan Hias pada Penerapan CDIB

b. Pembahasan Lanjutan Layanan Pembinaan Penerapan CDIB

Pembahasan layanan pembinaan penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada Senin, 17 November 2025 secara luring di Ruang Rapat VIP Kantin Sehat GMB II KKP. Rapat dipimpin oleh

Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Prasarana dan Sarana dan dihadiri oleh perwakilan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

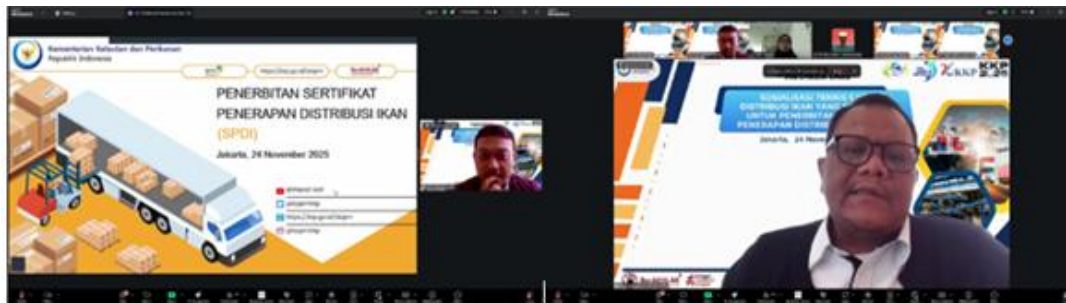
Kegiatan bertujuan untuk mengoordinasikan perkembangan penyusunan perangkat pendukung penilaian penerapan CDIB serta melakukan uji coba awal (dummy) sistem penilaian. Hasil rapat menyepakati bahwa sistem penilaian CDIB akan ditempatkan pada server yang telah tersedia dan terintegrasi dengan OSS, dengan pengaturan level akses pengguna sesuai kewenangan. Proses penilaian dilakukan melalui kuesioner dalam aplikasi, disertai mekanisme verifikasi berjenjang hingga persetujuan Direktur, serta penyediaan notifikasi dan pemantauan progres bagi pelaku usaha.

c. Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Sosialisasi teknis penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada Senin, 14 November 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka oleh Plt. Direktur Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini diikuti oleh 374 peserta yang terdiri atas perwakilan unit eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, UPT Badan Mutu se-Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta asosiasi dan pelaku usaha perikanan.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan CDIB dalam rangka menjaga mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada tahap distribusi serta meningkatkan daya saing produk perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjelaskan prosedur penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) agar proses perizinan menjadi lebih mudah dan terstandar.

Melalui sesi diskusi, disepakati bahwa unit usaha yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan tidak diwajibkan memiliki SPDI karena telah tercakup dalam sertifikasi kelayakan pengolahan. Selain itu, ditegaskan bahwa SPDI tidak menggantikan sertifikasi internasional dan hanya mengatur aspek distribusi domestik. Terkait kewajiban SPDI pada beberapa KBLI tertentu, diperlukan koordinasi dan pembahasan lanjutan untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 serta menghindari perbedaan interpretasi di kalangan pelaku usaha.



Gambar 22. Sosialisasi Teknis CDIB untuk Penerbitan SPDI

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya sebesar Rp2.903.990.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp.250.271.000,- dan sampai dengan periode tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.644.998.000,- atau setara dengan 99,67% dari pagu efektif, serta efisiensi anggaran sebesar Rp8.721.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,67%.

C. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional. Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang

diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi S.d 2025*	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN
Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	2025	310,51	335,53	108,06	352,01	335,53	95,32

Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Capaian Indikator Kinerja Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri tahun 2025 sebesar 335,53 triliun atau setara dengan 108,06% terhadap target 2025 sebesar 310,51 triliun. Capaian tersebut setara dengan 95,32% jika dibandingkan dengan target RENSTRA 2025-2029 sebesar 335,52 triliun. Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RENSTRA 2025-2029.

Pada tahun 2025, nilai pemasaran produk hasil perikanan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp55,17 triliun (16,44% terhadap total nilai pemasaran), dilanjutkan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp38,16 triliun (11,37%), Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp28,13 triliun (8,38%), Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp22,89 triliun (6,82%) dan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17,76 triliun (5,29%).

Berdasarkan produk hasil perikanan, nilai pemasaran produk hasil perikanan tertinggi terdapat pada produk teri diawetkan dengan nilai Rp30,88 triliun (9,20% terhadap total nilai), dilanjutkan dengan udang sebesar Rp21,51 triliun (6,41%),

kembung sebesar Rp20,13 triliun (6,00%), tongkol sebesar Rp19,99 triliun (5,96%), dan nila sebesar Rp18,99 triliun (5,66%).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1) Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Tujuannya adalah Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perubahan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas. Promosi gemarikan tahun 2025 telah dilaksanakan 158 promosi. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang berkualitas, aman, bergizi, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan Perluasan Safari Gemarikan dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Komisi IV DPR RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan Gemarikan hingga ke daerah-daerah, termasuk wilayah dengan tingkat konsumsi ikan yang masih relatif rendah, sehingga pesan dan manfaat Gemarikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dilaksanakan dalam berbagai bentuk promosi dan edukasi, antara lain sosialisasi langsung kepada masyarakat, kampanye konsumsi ikan, kegiatan edukatif bagi pelajar dan keluarga, serta penyampaian informasi mengenai manfaat gizi ikan bagi pertumbuhan, kecerdasan, dan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan beragam produk olahan hasil perikanan yang inovatif dan bernilai tambah, sehingga dapat meningkatkan minat dan preferensi masyarakat terhadap konsumsi ikan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal, Perluasan Safari Gemarikan

diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan, dari yang semula kurang mengonsumsi ikan menjadi lebih sadar akan pentingnya ikan sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari.

Kegiatan ini mencakup 158 promosi di 22 provinsi dan 74 kabupaten/kota. Selain itu, dilaksanakan juga penyelenggaraan 12 bazar produk kelautan dan perikanan menghasilkan total omzet UMKM sebesar Rp2,27 miliar. Promosi juga diperkuat melalui media sosial, dengan Instagram menjangkau lebih dari 113 ribu akun dan didominasi audiens perempuan (62,2%), serta dukungan distribusi bantuan ikan untuk kegiatan sosial dan nasional.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan distribusi Paket Gemarikan. Selain sebagai sarana edukasi konsumsi ikan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menampilkan dan mempromosikan produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM lokal. Melalui pengenalan produk UMKM tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat beli masyarakat, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha UMKM setempat.



Gambar 23. Kegiatan Safari Gemarikan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat

2) Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri (Harkannas)

Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri dilaksanakan sebagai langkah strategis yang berkesinambungan untuk memperkuat eksistensi dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik. Kegiatan promosi ini diwujudkan melalui Peringatan Harkannas ke-12 tahun 2025 mengusung tema “Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045”. Tema ini selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden, *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, serta mendukung Asta Cita Kedua yang menekankan pembangunan manusia unggul. Pemenuhan kebutuhan protein, khususnya yang bersumber dari ikan, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan kecukupan gizi dan kemandirian pangan dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Dalam konteks ini, ikan memegang peranan sangat penting sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang mudah diakses dan bermanfaat bagi kesehatan serta perkembangan generasi muda.

Rangkaian *pre-event* peringatan Harkannas tahun 2025 terdiri dari Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), *Webinar Series Road to Harkannas*, Seleksi Awal Lomba Masak Serba Ikan Nasional, Bazar Produk Kelautan dan Perikanan, Bincang Bahari, dan *Investment and Business Matching*. Puncak peringatan Harkannas tahun 2025 dilaksanakan di Anjungan Sarinah (*Car Free Day*) Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2025,



Gambar 24. Rangkaian Hari Ikan Nasional 2025

3) Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, kinerja, dan daya saing pelaku usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan kemampuan pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembinaan pada 400 UMKM. Pembinaan yang dilakukan melalui koordinasi dengan stakeholders terkait untuk menentukan lokasi pembinaan, dengan prioritas pelaku - pelaku usaha pemasaran meliputi: pasar-pasar ikan, maupun pasar umum yang memiliki pedagang ikan.

Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan secara *on the spot* baik di lokasi pasar ataupun di kantor dinas yang menangani sektor kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota. Jumlah peserta pada masing-masing lokasi disesuaikan dengan jumlah pelaku usaha yang ada. Telah dilaksanakannya Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran di beberapa daerah yaitu: 1. Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta pada tanggal 28 agustus 2025 dengan bekerja sama dengan Bank BNI untuk pengenalan produk pembayaran digital perbankan, 2. Kantor Dinas Perikanan Purworejo terkait Peningkatan Akses Pemasaran dengan Sarana Pemasaran yang baik dan benar bagi Pelaku Usaha di daerah Purworejo, 3. Kantor dinas Perikanan Yogyakarta terkait Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa *Coolbox* dan *Ice Flake* Mesin.



Gambar 25. Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran

4) Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri (Promosi Ikan Hias)

Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan produk-produk perikanan dalam negeri, memperluas akses pasar hasil perikanan dan kelautan, serta terlaksananya dukungan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga, instansi, dan mitra lain.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka Promosi Ikan Hias yaitu Melaksanakan Kontes Ikan Hias Cupang dengan tema “Nyupang Bari Wisata” pada tanggal 4-6 Oktober 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi ikan hias, tetapi juga menjadi panggung promosi potensi ikan hias Indonesia, khususnya ikan cupang, sebagai salah satu komoditas unggulan



Gambar 26. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri

5) Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan

Tujuannya adalah menyusun profil pasar dalam negeri hasil kelautan dan perikanan yang komprehensif dan berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan pasar, peningkatan konsumsi, dan penguatan daya saing produk perikanan domestik. Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan profil pasar dalam negeri antara lain penghitungan angka konsumsi ikan, penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri, serta penghitungan data dan informasi lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan buku Pedoman Penghitungan Angka Konsumsi Ikan.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memilih sumber data dan metode penghitungan angka konsumsi ikan (AKI) tahun 2024.

- b. Pelaksanaan *Workshop* Penghitungan AKI Tahun 2024

Workshop dilaksanakan pada tanggal 22-24 April 2025 secara *hybrid*, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Akses Pasar Dalam Negeri, serta dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 38 Provinsi, perwakilan dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan, perwakilan eselon II lingkup PDS, serta perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Pemasaran. *Workshop* ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan metode penghitungan AKI Tahun 2024, serta sosialisasi metode penghitungan AKI Tertimbang yang akan diterapkan dalam penghitungan AKI Tahun 2025. Pada kegiatan *workshop* dilakukan penghitungan konsumsi ikan di dalam rumah tangga berdasarkan data Susenas BPS. Selanjutnya, DKP Provinsi melakukan penghitungan konsumsi ikan di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta diinput pada *Tools Neng Geylis* sehingga diperoleh nilai angka konsumsi ikan total di Kabupaten dan Kota.



Gambar 27. *Workshop* Penghitungan AKI Tahun 2024

- c. Kajian Perilaku dan Preferensi Konsumen

Kajian Perilaku dan Preferensi Konsumen bertujuan untuk menyediakan gambaran empiris mengenai pola konsumsi ikan dan produk hasil perikanan rumah tangga Indonesia melalui analisis dan pemetaan jenis/bentuk produk perikanan, analisis preferensi konsumen berdasarkan

wilayah, demografi, dan sosial ekonomi, serta analisis faktor-faktor penentu keputusan konsumsi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder (Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan *E-commerce Tokpee*) dan data primer (observasi pasar tradisional dan retail modern serta diskusi kelompok terarah (FGD). Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif untuk data sekunder dan analisis kualitatif untuk data primer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola konsumsi ikan di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi perbedaan wilayah, tingkat urbanisasi, dan kelompok sosial ekonomi. Produk ikan segar masih mendominasi konsumsi rumah tangga, khususnya di wilayah pesisir dan pasar tradisional. Namun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan permintaan terhadap produk perikanan yang praktis dan siap konsumsi, terutama di kalangan konsumen urban dan kelas menengah. Preferensi konsumen dipengaruhi oleh faktor harga, kepraktisan, kepercayaan terhadap kualitas dan kehalalan, serta kemudahan akses melalui berbagai kanal distribusi, baik pasar tradisional, ritel modern, maupun *marketplace digital*.

6) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP

Merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan yang akan diusulkan untuk mendapatkan SNI sebagai acuan mutu, keamanan, dan daya saing produk dalam rangka melindungi konsumen dan mendukung pengembangan industri perikanan. Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan RSNI pada 3 produk. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak

pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

7) Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam melakukan diversifikasi produk kelautan dan perikanan bernilai tambah guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 500 pelaku usaha.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :

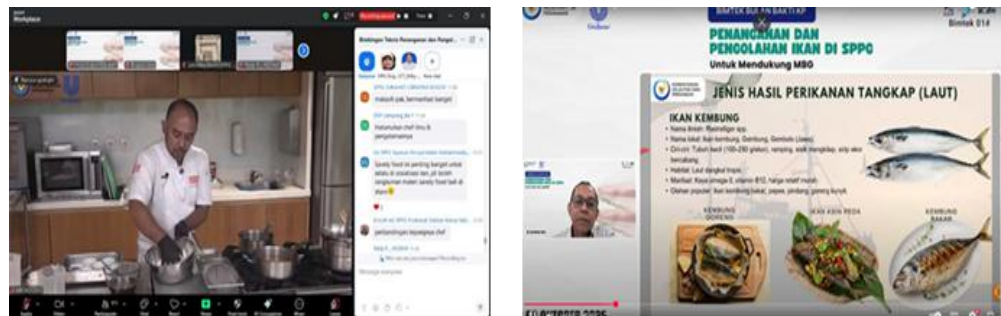
a. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 dan 22 Oktober 2025 secara daring melalui zoom dan youtube. Kegiatan Bimtek dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan hadir sebanyak 7086 peserta, 1874 peserta melalui zoom meeting dan 5212 peserta melalui youtube, peserta tersebut berasal dari SPPG di 36 Provinsi, 278 Kabupaten/Kota.

Setiap kegiatan juga mempertimbangkan kesetaraan partisipasi laki-laki dan perempuan dengan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi. Data terpilah gender digunakan sebagai dasar analisis kesenjangan, sehingga program pembinaan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik peserta secara adil dan inklusif.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman pengelola SPPG terkait penanganan serta pengolahan ikan yang baik, higienis, dan sesuai standar mutu dan keamanan pangan. Mendukung keberhasilan program nasional MBG melalui penyediaan ragam menu ikan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan bernilai gizi tinggi, serta mendorong pengolahan di SPPG *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP). Dalam kegiatan ini, beberapa materi disampaikan oleh berbagai

narasumber tentang pengolahan ikan dan pentingnya kualitas dan keamanan pangan. Penyampaian diikuti dengan demo memasak ikan patin dan gurame menjadi tiga menu bergizi dengan teknik sederhana. Penekanan pada kebersihan dan variasi resep diharapkan bisa menarik minat anak-anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola SPPG dan akan ada evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.



Gambar 28. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG

- b. *Forum Group Discussion* (FGD) analisis kesiapan dan kapasitas wilayah dalam penyediaan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di Hotel Swiss Bellin Wahid Hasyim, Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh BGN dan PT Surveyor Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapenas, Kementan, Kemendag, Kemenperin, KKP, BPS, BAPANAS, Kemenkop, Pemda DKI Jakarta, SPPG Jakarta, PERSAGI, Pergizi Pangan, AIPS, GKSI, PT Frisian Flag Indonesia, PT Indolacto, GAIN, FAO dan Pakar bidang ilmu dan teknologi susu (prof Evi Taufik) dan Pakar bidang rantai pasok (Prof Alla Asmara). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menghimpun perspektif dari pemangku kebijakan nasional, pelaku usaha rantai distribusi pangan, serta organisasi Masyarakat yang terlibat dalam intervensi gizi, konfirmasi hasil analisa awal proyeksi kebutuhan bahan pangan susu, mengidentifikasi permasalahan rantai pasok dalam negeri dari hulu ke hilir, memetakan kebijakan lintas sektor dan koordinasi antar instansi terkait kebijakan penyediaan bahan pangan susu untuk jangka pendek dan menengah, memetakan pemenuhan kebutuhan

protein nasional. Kebutuhan susu di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,7 juta ton, dengan produksi dalam negeri hanya 1 juta ton dan sisanya diimpor. Sektor kelautan bisa menyediakan protein alternatif, seperti Hidrolisat Protein Ikan (HPI), yang kaya protein dan nutrisi. Beberapa perusahaan telah memproduksi HPI dengan kapasitas bervariasi. HPI dapat menjadi solusi untuk pemenuhan gizi, memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor untuk meningkatkan produksinya.

8) Penyediaan Peralatan Pemasaran

Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pemasaran dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui penyediaan peralatan pemasaran yang memadai bagi pelaku usaha. Merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* dan *Ice Flake* Mesin guna Terjaganya mutu/kualitas ikan pada saat penyimpanan dan mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Tahun 2025 yaitu telah dilaksanakan pengiriman Peralatan Pemasaran Coolbox sebanyak 5870 Unit terbagi dalam III tahap yaitu Tahap I sebesar 2006 unit, Tahap II sebesar 1328 Unit, dan Tahap III sebesar 2536 Unit di 31 Provinsi dan 73 kabupaten/kota, serta satu unit *Ice Flake* Mesin di Pasar Bringharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta.



Gambar 29. Penyediaan Peralatan Pemasaran

9) Penyediaan Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan

Tujuannya adalah menyediakan prasarana pemasaran hasil kelautan dan perikanan guna mendukung kelancaran distribusi, efisiensi pemasaran, dan peningkatan daya saing produk.

Penyediaan prasarana pemasaran kelautan dan perikanan pada tahun 2025 ditargetkan terealisasi sebanyak 2 unit. Namun realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir periode 2025 pelaporan adalah 1 unit yaitu pasar ikan di kabupaten banjarnegara provinsi jawa tengah tidak terealisasinya 1 unit prasarana lainnya disebabkan oleh adanya kebijakan blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana awal.

10) Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP

Tujuannya adalah mengoptimalkan penerapan sistem rantai dingin, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta mendukung pencapaian produksi olahan hasil kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku UMK Pengolahan. Pada tahun 2025 memfasilitasi pemberian Bantuan Pemerintah berupa chest freezer sebanyak 406 unit dengan lokasi penerima di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Asahan, Asmat, Bandung, Bandung Barat, Banjar, Banjarnegara, Bantul, Banyuasin, Banyumas, Banyuwangi, Bekasi, Bengkulu Utara, Bogor, Boyolali, Buru, Buton Selatan, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Demak, Flores Timur, Garut, Gunungkidul, Indramayu, Jenepono, Jepara, Jombang, Karanganyar, Karangasem, Kebumen, Kendal, Kepulauan Sula, Klungkung, Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kulon Progo, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lebak, Lembata, Lombok Barat, Madiun, Magetan, Majalengka, Majene, Malang, Merauke, Mesuji, Mojokerto, Muna Barat,

Ngawi, Nias Utara, Pacitan, Pandeglang, Pangandaran, Pasangkayu, Pati, Pemalang, Polewali Mandar, Ponorogo, Poso, Probolinggo, Pulang Pisau, Pulau Taliabu, Purbalingga, Purworejo, Rote Ndao, Sambas, Sanggau, Seluma, Serang, Sidoarjo, Sintang, Subang, Sukabumi, Sukoharjo, Sumedang, Sumbawa, Sumenep, Tabanan, Tasikmalaya, Temanggung, Toli-Toli, Trenggalek, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Wajo, Wakatobi, Way Kanan, Wonosobo, Ambon, Bandar Lampung, Batam, Bogor, Depok, Langsa, Madiun, Manado, Padang, Probolinggo, Serang, Singkawang, Sorong, Surakarta, Tangerang Selatan, Tarakan, Jakarta Utara. yang berperan penting dalam menjaga mutu, kesegaran, dan keamanan produk perikanan sepanjang rantai pasok, sekaligus menekan kehilangan hasil (*post-harvest loss*).

11) Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil KP

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan hasil kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana pengolahan yang memadai guna mendukung peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk. Tahun 2025, telah menyediakan peralatan pengolahan ikan mencapai 34 unit dengan lokasi penerima di Asahan, Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bengkulu Utara, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Karanganyar, Kebumen, Kubu Raya, Kulon Progo, Lebak, Mesuji, Pacitan, Pandeglang, Pangandaran, Probolinggo, Purworejo, Serang, Subang, Sukabumi, Sukoharjo, Tasikmalaya, Temanggung, Depok, Manado, Serang, Surakarta, Jakarta Utara, yang ditujukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk, diversifikasi olahan, serta penguatan usaha pengolahan berbasis masyarakat.

12) Penyediaan Sarana Penyimpanan Produk KP

Tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana penyimpanan produk kelautan dan perikanan guna menjaga mutu, keamanan,

dan kontinuitas pasokan serta mendukung efisiensi sistem logistik. Namun demikian karena adanya blokir anggaran, maka penyediaan sarana penyimpanan berupa dokumen perencanaan sarana penyimpanan.

13) Penyiapan Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan

Tujuannya adalah menyiapkan bahan teknis dan substantif sebagai dasar perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan guna mendukung penerapan standar mutu, keamanan, dan daya saing produk

Tahun 2025 telah menghasilkan tujuh (7) bahan RSNI yaitu Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska Siap Makan; Pempek; Agar-agar Kertas; Pedoman Pengujian Sensori pada Produk Perikanan; Tuna Loin Segar; Tuna Loin Beku; dan Dodol Rumput Laut. Satu judul bahan RSNI merupakan hasil kolaborasi BBP3KP dengan Institut Pertanian Bogor yaitu Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Bahan RSNI disusun dengan tahapan antara lain: pengajuan usulan judul, penentuan konseptor, pengumpulan data, pengambilan contoh, pengiriman contoh ke laboratorium pengujian, penyusunan konsep, pembahasan bahan RSNI secara internal maupun dengan atau tanpa rapat eksternal dengan Komite Teknis 65-05.

Penyediaan SNI produk kelautan dan perikanan dalam rangka perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi LSPPro-HP sebanyak 15 produk yaitu Stik Kepiting Analog (*Imitation Crab Stick*); Udang Berlapis Tepung Beku; Sosis Ikan; Chikuwa; Lumatan Ikan; Ikan Segar; Ikan Beku; Fillet Ikan Beku; Rendang Ikan Tuna; Keripik Belut; Keripik Ikan; Keripik Kulit Ikan Goreng; Nori; Dendeng Ikan; dan Ikan, Moluska, dan Ekinodermata Kering Tawar. Pada saat ini telah dilaksanakan pengajuan perluasan ruang lingkup layanan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).



Gambar 31. Penyiapan Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

14) Penilaian Kesesuaian terhadap Produk Kelautan dan Perikanan

Tujuannya adalah menjamin bahwa produk kelautan dan perikanan yang beredar memenuhi persyaratan standar, mutu, dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk.

Melalui LSPro-HP BBP3KP menjalankan peran strategis dalam melaksanakan penilaian kesesuaian produk yang meliputi evaluasi sertifikasi awal, surveilan, resertifikasi, *witness* proses produksi, hingga penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan/atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Klien yang mendapatkan pelayanan sertifikasi mencakup industri skala besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan lokasi pelaksanaan kegiatan di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2025 LSPro-HP BBP3KP telah memberikan layanan sertifikasi SNI sejumlah 169 produk.



Gambar 30. Surveilan Pertama PT Citraraja Ampat

15) Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Tujuannya adalah menjamin mutu, keamanan, dan kesesuaian produk kelautan dan perikanan melalui pengujian laboratorium sesuai standar yang berlaku guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Laboratorium BBP3KP telah melaksanakan berbagai kegiatan pengujian

nutrisi dan keamanan produk perikanan serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 secara konsisten. Kegiatan pengujian meliputi uji kimia, fisika, sensori, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi terhadap 297 sampel produk kelautan dan perikanan dengan total 1.142 data uji. Produk yang diuji terdiri dari klien laboratorium yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk sebaran klien yang terbanyak melakukan pengujian adalah dari Provinsi DKI Jakarta, untuk produk yang diuji berdasarkan jumlah data yang terbanyak yaitu Ikan dalam kemasan kaleng, Abon Ikan, Ikan Segar dan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) dan untuk parameter uji yang paling banyak diuji yaitu Organoleptik/Sensori, Timah Hitam (Pb), Kadar Air dan Filth. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar produk, yaitu 249 produk, memenuhi persyaratan mutu sesuai standar, sementara 48 produk tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan.

16) Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan

Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas usaha, inovasi produk, kemandirian, dan daya saing UMKM. Pada Tahun 2025, Inbis Invapro KAPE membina 9 (Sembilan) UMKM/ tenant yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Ambon, dan Kabupaten Lombok Barat. Produk yang dihasilkan berupa olahan hasil perikanan bernilai tambah, meliputi produk kering atau *snack*, produk beku, serta makanan siap saji seperti kerupuk lele, pempek, dimsum, abon ikan, stick cumi, sambal ikan, dan berbagai produk olahan ikan lainnya.

Pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian kegiatan pendampingan dan fasilitasi, meliputi bimbingan teknis pengembangan usaha, fasilitasi perizinan dan sertifikasi, pelatihan penyusunan *Business Model Canvas* (BMC), pelatihan manajemen usaha dan keuangan, pelatihan digital marketing, pendampingan penerapan jaminan mutu, fasilitasi desain dan

kemasan produk, penyediaan bahan promosi, monitoring perkembangan usaha, serta evaluasi akhir program. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk, legalitas usaha, tata kelola bisnis, dan perluasan akses pasar UMKM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh tenant mencapai nilai keberhasilan di atas 60, sehingga dinyatakan berhasil dengan kategori mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Nilai tertinggi diraih oleh PT Bleszing Delifoods Indonesia sebesar 92,13, sementara tenant lainnya berada pada kategori berhasil dengan baik hingga cukup baik. Capaian ini menunjukkan bahwa program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM binaan.

Secara umum, program ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha tenant. Rata-rata omzet mengalami peningkatan sebesar 69 persen, dari Rp18,7 juta menjadi Rp31,6 juta per bulan. Rata-rata produksi meningkat 175,9 persen, dari 162,1 kg menjadi 447,3 kg per bulan. Jangkauan pemasaran meningkat sebesar 25 persen, jumlah saluran pemasaran bertambah 14,3 persen, kepemilikan sertifikasi usaha meningkat 16,7 persen, jumlah kemitraan naik 83,3 persen, serta diversifikasi produk meningkat 50 persen. Dengan capaian tersebut, Program Inbis Invapro KAPE Tahun 2025 dinilai berhasil dalam meningkatkan daya saing UMKM sektor kelautan dan perikanan serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal.

17) Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah

Tujuannya adalah untuk mendorong pelaku usaha menerapkan pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah sehingga Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran bidang kelautan dan perikanan, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produk sesuai persyaratan, menambah ragam produk dan memenuhi keberterimaan pasar.

Produk yang diuji terapkan oleh UMKM penerap berjumlah 12 produk yaitu : *Fish Chips*, Cilok Ikan, Abon Lembaran, Permen Rumput Laut, Stik Ikan, Dimsum, Odeng, Sempol, Pilus, Krispi RL, Mie Ikan, dan Pizza Udang. Pengujian yang dilakukan di Laboratorium BBP3KP yang dihasilkan dari jumlah data uji dari 12 produk penerap dengan 5 parameter uji (kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan Natrium) berjumlah 60 data uji.



Gambar 31. Produk yang diuji terapkan oleh UMKM penerap

18) Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan diseminasi terbagi menjadi pengelolaan data, informasi dan publikasi; dan pelaksanaan diseminasi. Pengelolaan data, informasi dan publikasi dilaksanakan melalui 1) peliputan berita, 2) penyusunan konten media sosial, 3) pengelolaan Website BBP3KP, 4) pengelolaan media sosial (*Facebook, Instagram, X/Twitter, TikTok, YouTube*), dan 5) pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBP3KP. Sedangkan pelaksanaan diseminasi dilakukan melalui 1) pameran/demonstrasi/webinar, 2) konsultasi, 3) penyebaran media cetak (*leaflet/booklet*), 4) penyebaran informasi melalui portal online (*website*), 5) penyebaran informasi melalui media sosial (*Facebook, Instagram, X/Twitter, TikTok, YouTube*), dan 6) Perpustakaan.

Tahun 2025, telah menyusun 256 desain konten media sosial, 70 berita/artikel pada *website*, dan mengelola 5 akun media sosial. BBP3KP juga telah melaksanakan penyebarluasan informasi pada 16 *event* dengan metode tatap muka langsung melalui pameran/demonstrasi maupun secara *daring* berupa webinar/workshop. Pameran/demonstrasi/webinar dikunjungi

sebanyak 1.013 penerima informasi (352 orang atau 34,75% laki-laki dan 661 orang atau 65,25% perempuan) dengan rata-rata nilai kepuasan khalayak 88,78 dalam mutu “A” (Sangat Baik). Adanya pelibatan perempuan sebagai penerima manfaat menunjukkan komitmen terhadap prinsip perencanaan dan penganggaran responsif gender.

19)Pembangunan Prasarana Pendukung Operasional Gudang beku

Tujuannya adalah meningkatkan kelancaran, keandalan, dan efisiensi operasional gudang beku melalui pembangunan prasarana pendukung yang memadai guna menjamin mutu, keamanan, dan kontinuitas penyimpanan produk kelautan dan perikanan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMN gudang beku telah dilakukan revitalisasi bangunan gedung dan pengadaan berupa prasarana untuk menunjang pengelolaan dan pelayanan gudang beku yang prima dengan hasil sebagai berikut:

- a. Revitalisasi Instalasi Pendingin *Cold Storage* 1 paket,
- b. Revitalisasi Instalasi Jaringan Listrik Gedung *Cold Storage* 1 unit,
- c. Revitalisasi Pagar Belakang 1 unit,
- d. Revitalisasi kontainer *plugging* 1 paket
- e. Pemeliharaan SLO Listrik *Cold Storage*
- f. Pemeliharaan SILO Lift *Cold Storage*

20)Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku

Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasional gudang beku melalui penyediaan sarana pendukung yang memadai guna menjamin mutu, keamanan, dan kontinuitas penyimpanan produk kelautan dan perikanan. Saat ini Cold Storage 1.000 dan 2000 ton Muara Baru telah dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset Barang Milik Negara (BMN) dan menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat pentingnya peran cold storage dan untuk meningkatkan layanan maka diperlukan Sarana Pendukung Operasional Cold Storage 1.000 dan 2000 ton sebanyak 224 unit untuk menunjang pengelolaan dan pelayanan. Adapun sarana yang disediakan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Palet Besi 50 unit,
- b. Pengadaan Palet Plastik 150 unit,
- c. Pengadaan Alat Kalibrasi Massa 2 unit,
- d. Pengadaan *Centrifuse* 1 unit,
- e. Pengadaan Sarana pendukung penyusunan media informasi 2 unit,
- f. Pengadaan Sarana Pendukung Diseminasi 7 unit,
- g. Pengadaan Alat Kalibrasi Suhu 2 unit,
- h. Pengadaan Perangkat pengolah data 10 unit

21) Fasilitas Badan Usaha pada Kemitraan Penyimpanan Produk

Tujuannya adalah mendorong terbentuknya dan penguatan kemitraan antara badan usaha dalam penyimpanan produk kelautan dan perikanan guna menjamin ketersediaan, mutu, dan kelancaran distribusi produk, serta pemanfaatan cold storage BMN. Tahun 2025, telah dilakukan fasilitas pada 15 badan usaha pada kemitraan penyimpanan produk Cold Storage KKP. Adapun badan usahanya sebagai berikut : PT. Menara Bahari Nusantara, PT. Triguna Lestari Sejahtera, PT. Artha Bahari Sentosa, PT. Mina Bahari Abadi, CV. Lintas Samudera Mandiri, PT. Mina Agro Sejahtera, PT. Arto Ulam Jaya, Koperasi Mina Muara Sejahtera, CV. Putri Dahlia, CV. Hasil Mandiri Jaya, CV. Kharisma Dunia Indah, PT. Maharani Artha Prima, PT. Makima Mina Axia, Koperasi Mina Rizki Abadi dan PT Anugerah Lautan Samudera.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri sebesar Rp89.994.720.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp.39.852.888.000,- dan sampai dengan periode tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp49.664.386.000,- atau setara dengan 99,05% dari pagu efektif, serta efisiensi

anggaran sebesar Rp477.446.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,05%.

D. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas menunjukkan kenaikan kelas usaha berdasarkan 6 aspek usaha yang telah ditentukan sesuai dengan Kepdirjen Nomor 56 tahun 2024. Aspek usaha yang menjadi indikator terdiri dari aspek legalitas, sumberdaya manusia, produksi, keuangan, pemasaran dan operasional.

Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian:

- a. Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 sampai dengan 50;
- b. Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 sampai dengan 70;
- c. Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sampai dengan 100.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi S.d 2025*	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN
Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (Persen)	2025	5	6,01	120,2	7	6,01	85,86

Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Capaian indikator kinerja Target Presentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 sebesar 6,01% atau setara 120,2% terhadap target tahun 2025 sebesar 5%. Realisasi persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas sebesar 6,01% berasal 39 UMKM dari 647 UMKM terkurasi. Capaian tersebut setara 85,86% jika dibandingkan dengan target RENSTRA 2025-2029 sebesar 7%. Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RENSTRA 2025-2029.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha pada Lembaga Usaha KP

Tujuannya adalah memperkuat kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan agar lebih profesional, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan pendampingan kelembagaan usaha KP, fasilitasi pembentukan koperasi dan badan usaha berbadan hukum, serta penguatan model kelembagaan berbasis klaster/korporasi, termasuk dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini

merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan sebanyak 6 lembaga usaha.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terpilih di Wilayah IV.

Dalam rangka Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT), telah dilakukan kegiatan Pendampingan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 6 Oktober-15 Desember 2025. Secara kelembagaan, seluruh KDKMP telah memiliki struktur organisasi dan sebagian besar sudah dilengkapi jobdesk pengurus, pengawas, SOP, serta telah siap melakukan RAT Tahun Buku 2025. Untuk pengembangan bisnis, pendamping bersama pengurus telah menyusun model bisnis, proposal bisnis dan proposal pembiayaan yang dapat disampaikan kepada calon investor, mitra potensial dan lembaga pembiayaan. KDKMP telah memiliki dan melakukan pengkinian data di akun SIMKOPDES, serta memiliki akun media sosial sebagai sarana komunikasi dan digitalisasi dengan anggota atau sosialisasi dengan warga desa/kelurahan. Dari hasil pendampingan didapatkan kinerja KDKMP meningkat, semula pada kisaran 23%–74% menjadi sekitar 50,6%–86,6%.

- b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada Koperasi Sektor Kelautan dan Perikanan.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kepada koperasi sektor kelautan dan perikanan terpilih dilakukan bersama dengan Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia (ASPPENDO). Tujuannya adalah untuk:

- Memperkuat kemampuan manajerial, termasuk perencanaan usaha, pencatatan keuangan, dan administrasi.
- Memberikan skema pinjaman/pembiayaan untuk koperasi.

- Memberikan peluang pembiayaan dan kemitraan sesuai kebutuhan koperasi dengan penyusunan proposal bisnis dan proposal pembiayaan.

2) Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Kemitraan Usaha

Tujuannya adalah memfasilitasi UMKM KP pada akses pembiayaan dan kemitraan usaha dalam rangka peningkatan kelas usaha. Kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi fasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan UMKM KP, pembentukan dan penguatan Pokja Kredit Program, pendampingan penyaluran KUR sektor KP, serta fasilitasi kemitraan UMKM. Tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan sebanyak 56 UMKM.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Fasilitasi kemitraan usaha.

Ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan. kegiatan fasilitasi kemitraan dimaksud yaitu :

- Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Jasa Sukses Inti Komoditas dengan Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik pada tanggal 13 Oktober 2025
- Identifikasi Potensi Kemitraan Koperasi Perikanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 30 Oktober 2025. kegiatan ini Dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Pusat Penyuluhan KP mengadakan pertemuan dengan Koperasi Perikanan untuk mengidentifikasi potensi kemitraan dengan Koperasi Desa/Kelurahan

b. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025.

Total realisasi Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III 2025 sebesar Rp5,62 Triliun yang disalurkan kepada 256.098 debitur, atau setara dengan 70,44% dari target nilai pembiayaan 2025 sebesar Rp7,99 Triliun. Secara *year on year* nilai realisasi pembiayaan menurun 8,16%, dan jumlah debitur meningkat 13,44%. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sektor kelautan dan perikanan hingga Triwulan III Tahun 2025 secara umum menunjukkan tren penurunan secara *year on year*. Dalam upaya peningkatan realisasi KUR, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian melalui usulan relaksasi kebijakan skema KUR khusus sektor kelautan dan perikanan. Usulan ini dapat disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai bentuk dukungan program prioritas KKP, lembaga keuangan membutuhkan informasi yang lebih detail untuk sebaran lokasi KNMP dan KDMP pengelola, serta perhitungan nilai dan potensi bisnis yang ada di setiap lokasi KNMP. Sementara itu, data potensi sebaran lokasi dan hitungan bisnis usaha produksi garam akan disiapkan lebih lanjut oleh Direktorat Sumberdaya Kelautan untuk dapat difasilitasi akses permodalannya oleh lembaga keuangan.



Gambar 32. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kredit Program Sektor KP

c. Rapat Fasilitasi Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Pemanfaatan KUR.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan KUR di sektor kelautan dan perikanan serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha, telah dilaksanakan rapat pembahasan hasil analisis monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan dampak KUR pada tanggal 4 Desember 2025.

Keragaan data yang diperoleh dari hasil monev adalah sebagai Berikut (1) Jumlah sampling debitur yang mengisi kuesioner : 430 debitur (57,33% dari target 750 debitur); (2) Nilai total pencairan KUR sektor KP yang menjadi sampling monev ini sebesar Rp 45.058.100.000,- dan (3) Penerima KUR tahun 2024 sebanyak 254 Debitur dan penerima Tahun 2025 sebanyak 176 Debitur.

Dari total realisasi Rp 45.058.100.000,-, Sektor usaha budidaya memiliki persentase terbesar yaitu 52,17%, kemudian usaha pemasaran 30,50%, penangkapan 6,41%, pengolahan 6,01% dan jasa perikanan 4,92%.; (2) Analisa penyaluran KUR berdasarkan kesesuaian pengajuan diperoleh sebesar 99,06% telah sesuai dengan pengajuan awal sesuai proposal pengajuan KUR yakni untuk modal kerja, pengadaan sarana dan prasarana dan penambahan/perluasan Gedung/lahan.

Penilaian keberhasilan Program KUR dilakukan dengan mengukur dampaknya terhadap lima aspek utama usaha, yaitu peningkatan aset, omzet, produksi, tenaga kerja, dan perluasan pemasaran. Adapun hasil yang diperoleh adalah (1) Kategori UMKM Sangat Berhasil (42%) Sebanyak 180 UMKM mengalami peningkatan di semua 5 aspek (omzet, aset, produksi, tenaga kerja, dan pemasaran). Kelompok ini menunjukkan pemanfaatan KUR yang paling optimal ; (2) Kategori Berhasil (34%) Sebanyak 147 UMKM menunjukkan perkembangan yang kuat dengan peningkatan pada 4 aspek. Umumnya, peningkatan terjadi pada omzet,

aset, volume produksi, dan jangkauan pemasaran; (3) Kategori Cukup (19%) 83 UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah menerima KUR. Artinya, program ini mampu mendorong peningkatan usaha di 3 aspek, meskipun belum mencapai hasil optimal; dan (4) Kategori kurang berhasil (5%) 20 UMKM yang belum merasakan manfaat optimal dari KUR, Hal ini terlihat dari peningkatan yang terbatas pada hanya 1–2 aspek, kemungkinan terkait kondisi usaha yang belum stabil atau pemanfaatan modal yang belum maksimal

3) Kurasi Produk Kelautan Perikanan

Kurasi Produk UMKM adalah proses menjaga nilai serta mengelola produk UMKM untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan dikemudian hari. Dalam mengolah produk UMKM agar memiliki sebuah nilai, diperlukan sebuah standar yang sama satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan dalam menyeleksi sebuah produk. Pelaksanaan kegiatan Kurasi Produk Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Lampung, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Yogyakarta. Tahun 2025 telah dilaksanakan kurasi pada UMKM sebanyak 58 UMKM

4) Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP

Tahun 2025 telah dilaksanakan penumbuhan dan pembinaan wirausaha KP sebanyak 137 UMKM. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Rapat verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran.

Telah dilaksanakan sebanyak 21 kali, dimana selama periode tersebut telah diterbitkan 23 Sertifikat Standar Pengolahan dan Pemasaran Ikan kepada 21 pelaku usaha yang bermohon dengan rincian 8 Sertifikat Standar Subsektor Pengolahan Ikan dan 15 Sertifikat Standar Subsektor Pemasaran Ikan yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas wirausaha dalam mendukung kenaikan kelas usaha UMKM. Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP membentuk wirausahawan yang inovatif, adaptif dan memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola usaha. kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali di kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan 1 kali kegiatan bimtek kewirausahaan bagi UMKM naik kelas untuk memperkuat peluang ekspor ke malaysia. kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM KP dan output kegiatan sebanyak 137 UMKM dengan total 1.582 peserta (833 perempuan dan 749 laki-laki). Pendekatan pengarusutamaan gender diterapkan untuk memastikan keterwakilan perempuan minimal 30–50% dan mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir, selain itu kegiatan pembinaan wirausaha reguler bagi wirausaha baru dan wirausaha existing dengan Pelaksanaan Webinar “Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Wirausaha Perikanan Berkelanjutan” Series 1 – 8 pada rentang Bulan September – Desember 2025 setiap hari Selasa per 2 (dua) minggu.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas sebesar Rp1.331.806.000,- dan sampai dengan periode tahun 2025 telah direalisasikan

sebesar Rp1.331.465.000,- atau setara dengan 99,97% dari pagu efektif, serta efisiensi anggaran sebesar Rp341.000,-. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,97%.

Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP

A. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi S.d 2025	Persentase Realisasi S.d 2025 terhadap Target RPJMN
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	2025	86	90,84	105,63	88	90,84	103,22

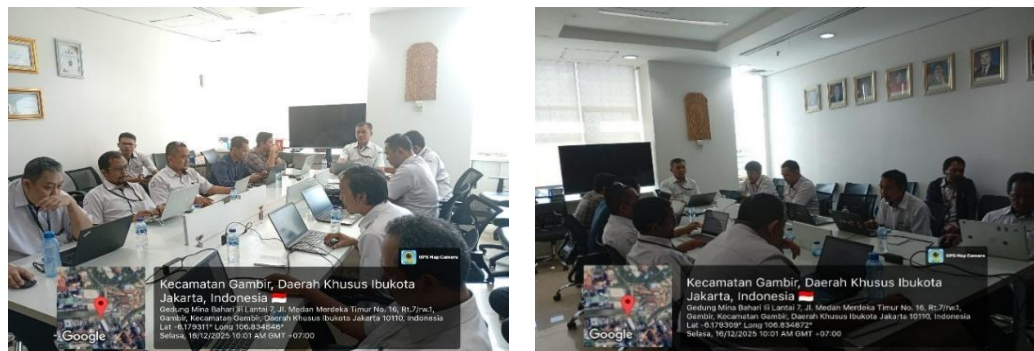
Capaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 90,84 atau setara dengan 15,63% terhadap target 2025 sebesar 86. Capaian tersebut setara dengan 103,22 jika dibandingkan dengan target RENSTRA 2025-2029 sebesar 88. Capaian pada tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya karena indikator ini

merupakan indikator baru dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RENSTRA 2025-2029.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi reformasi birokrasi antara lain:

a. Kegiatan Terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 11 September 2025;
- 2) Melaksanakan rapat pembahasan monitoring progres pelaksanaan kegiatan prioritas sistem rantai dingin pada lokasi kampung nelayan merah putih pada tanggal 16 Desember 2025, pelaksanaan kegiatan di hadiri oleh Inspektorat Jenderal IV KKP, Perwakilan tim teknis pendukung PPK lingkup Ditjen PDSPKP para penyedia kegiaran sistem rantai dingin KNMP pada Ditjen PDSPKP;



Gambar 33. Rapat Pembahasan Monitoring Progres Pelaksanaan Kegiatan Prioritas KNMP

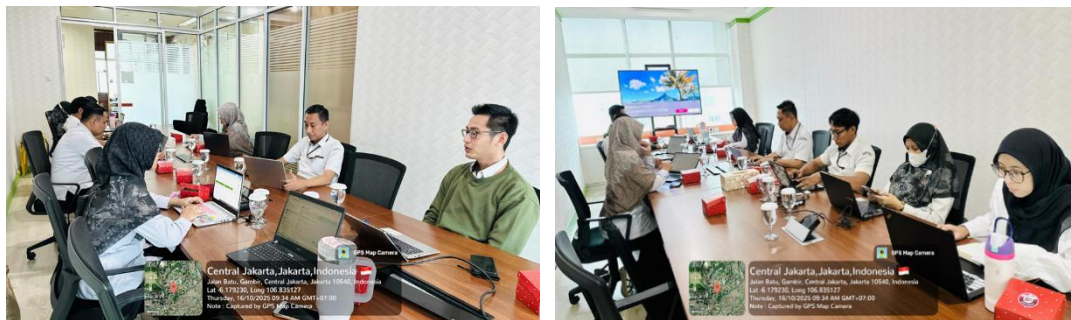
- 3) Melaksanakan koordinasi tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP dengan Inspektorat Jenderal IV KKP.
- b. Kegiatan Terkait Batas Tertinggi Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;

- 2) Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Juli sd September Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Oktober 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi serta tutup periode pada aplikasi sakti dan monsakti;
 - 3) Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Kegiatan terkait Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 periode triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengisian dan evaluasi capaian rencana aksi lingkup Ditjen PDSPKP dengan melibatkan perwakilan Biro Perencanaan KKP dan unit kerja eselon II;
 - 2) Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP. Rapat bertujuan untuk melakukan pengukuran atas capaian kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan Ditjen PDSPKP periode triwulan III tahun 2025; Rapat Pelaporan Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP, penyusunan Draft LKJ Level I dan II periode Triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 13 oktober 2025. Kegiatan Penyusunan Draft Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan untuk membahas penyusunan LKj Level I dan Level II serta verifikasi dan pemutakhiran data kinerja lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 34. Rapat penyusunan LKj Level I dan Level II

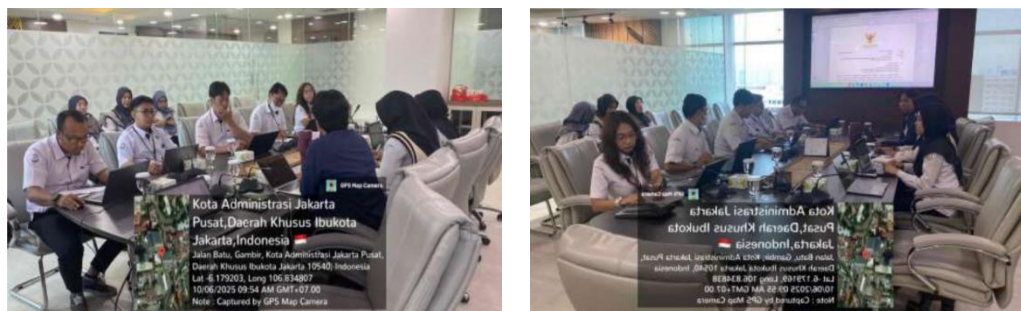
- 3) Rapat verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK) Triwulan III tahun 2025 dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2025;



Gambar 35. Rapat verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja(SAPK)

- 4) Rapat Monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja sampai dengan triwulan III dan persiapan pelaporan triwulan IV tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP, Verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan pada link SAKIP Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 19 Desember 2025. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja serta Persiapan Pelaporan Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pelaporan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP;
- d. Kegiatan Terkait Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian output unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP secara berkala;
 - 2) Pengisian proyeksi rencana penarikan dana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025. Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi indikator Rencana Penarikan Dana Triwulan III dan pengisian proyeksi Rencana Penarikan Dana periode Triwulan IV

- 3) Rapat monitoring pelaksanaan IKPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Keuangan KKP pada tanggal 6 Oktober 2025.
- e. Kegiatan Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2025. Rapat dilaksanakan untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PDSPKP TA 2026 Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026;



Gambar 36. Rapat rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran

- 2) Rapat Pembahasan Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026 Pagu Alokasi Anggaran, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025. Rapat membahas struktur alokasi anggaran per jenis belanja dan program, serta mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung, penyesuaian standar kebutuhan barang, dan pemenuhan ketentuan perencanaan teknis;
- 3) Rapat Pembahasan Catatan Hasil Review (CHR) pagu alokasi anggaran Tahun 2026 lingkup Ditjen PDSPKP, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025. Rapat membahas pagu anggaran yang bersumber dari

Rupiah Murni serta mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung;

- 4) Rapat reviu atas usulan revisi pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas presiden lingkup KKP, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025. Rapat membahas relaksasi efisiensi anggaran KKP untuk mendukung belanja pegawai, operasional, pelayanan publik, kegiatan prioritas nasional, serta peningkatan penerimaan negara.
- 5) Rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025. Rapat membahas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 agar selaras dengan RPJMN dan Renstra KKP.



Gambar 37. Rapat penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

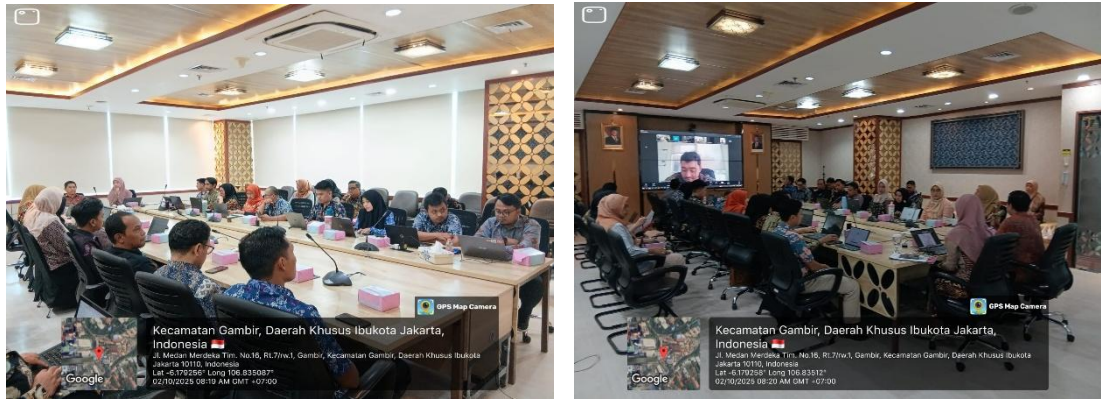
- f. Kegiatan Terkait Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengendalian sistem pengendalian intern terkait Penyelenggaraan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2025 pada tanggal 27 November 2025. Kegiatan diikuti oleh Biro Keuangan KKP dan perwakilan tim PIPK lingkup Ditjen PDSPKP. kegiatan bertujuan untuk melakukan koordinasi persiapan reviu PIPK Ditjen PDSPKP oleh inspektorat Jenderal KKP;



Gambar 38. Koordinasi persiapan reviu PIPK Ditjen PDSPKP oleh inspektorat Jenderal KKP

- 2) Pelaksanaan kegiatan persiapan evaluasi matritas SPIP KKP Tahun 2025 bersama BPKP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025, pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh perwakilan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian data dukung SPIP;
 - 3) Keikutsertaan pada rapat evaluasi atas maturitas sistem perngendalian intern pemerintah pada kementerian keluatan dan perikanan tahun 2025 pada tanggal 22 Desember 2025 di ruang rapat wisma Gracillaria. Pelaksanaan kegiatan di ikuti oleh Tim SPIP Biro Perencanaan, Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal Mitra Eselon I KKP, Perwakilan Tim SPIP Maturitas Lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- g. Kegiatan Terkait Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 2 Oktober 2025;



Gambar 39. Pengarahan dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP lingkup Ditjen PDSPKP

- 2) Verifikasi berkas dan persiapan assessment Tugas Belajar, penilaian kompetensi jabatan fungsional bagi pegawai Ditjen PDSPKP pada tanggal 9, 22, dan 27 Oktober 2025, serta 23 Desember 2025;
 - 3) Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat struktural lingkup Ditjen PDSPK pada tanggal 10 dan 17 Oktober 2025;
 - 4) Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan III Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025;
 - 5) Rapat Pengarahan Peserta Magang Nasional lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 November 2025;
 - 6) Rapat Pembahasan Penataan Pegawai dan Pengisian Jabatan Struktural lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 November 2025;
 - 7) Rapat Sosialisasi Permen PANRB No. 6 tahun 2022 & Bimtek Pengisian SKP lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 5 Desember 2025
 - 8) Rapat kerja Kerja Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN melalui *Corporate University* KKP pada tanggal 18–19 November 2025
- h. Kegiatan Terkait Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 Oktober 2025 di PT. Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa, Cikarang Selatan:



Gambar 40. Pemusnahan Arsip lingkup Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

- 2) Kegiatan Penataan Arsip Inaktif (Arsip Keuangan) sampai dengan 3 - 7 November 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat;
 - 3) Kegiatan Penataan Arsip Inaktif pada tanggal sampai dengan 1 - 20 Desember 2025 di Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat.
- i. Kegiatan Terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) tanggal 19 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemutakhiran rencana pengadaan barang/jasa Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025;

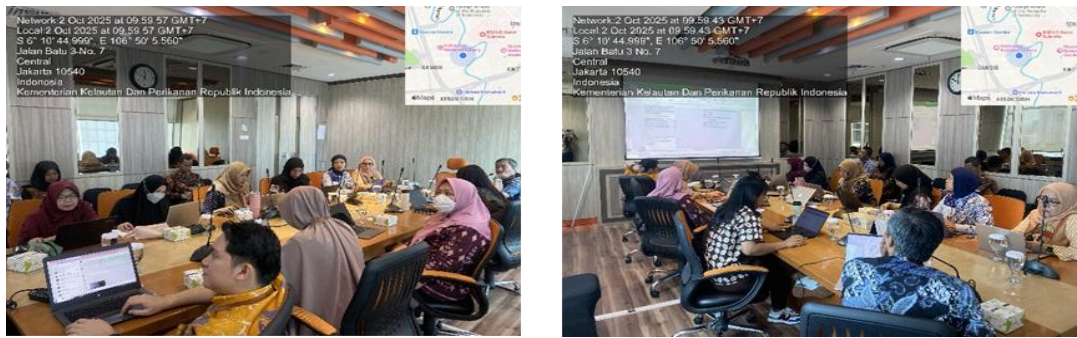


Gambar 41. Rapat Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- 2) Pelaksanaan rapat audiensi calon penyedia sarana sistem rantai dingin pada kegiatan kampung nelayan merah putih tahap I tahun anggaran 2025

dilaksanakan dengan mengundang para calon penyedia sarana sistem rantai dingin yaitu kendaraan berpendingin, gudang beku portabel, pabrik es portabel (*slurry ice* dan balok) dan *Cool Box*;

- 3) Rapat monitoring progress pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih secara berkala. Dilakukan dengan tujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian pekerjaan Sistem Rantai Dingin pada lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
 - 4) Rapat Pengadaan renovasi ruang Direktorat Akses Pasar dan Promosi yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP;
 - 5) Rapat pemutakhiran SIRUP dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setjen KKP dan Perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Rapat membahas input Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2026 menggunakan sistem SIRUP.
- j. Kegiatan Terkait Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari Senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 2) Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas;
 - 3) Rapat penyusunan Rencana Aksi RB Tematik KKP dengan seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025;



Gambar 42. Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik lingkup Ditjen PDSPKP

- 4) Rapat *Entry Meeting* Pemantauan Nilai Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025;
- 5) Sharing Session Kebijakan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Ditjen PDSPKP pada kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema "Membangun Budaya Pelayanan Prima melalui Penerapan Komunikasi Efektif dan Sistem Penanganan Pengaduan yang responsif". Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025;
- 6) Rapat koordinasi penyusunan Finalisasi Rencana Aksi RB Tematik KKP bersama Biro SDM Aparatur dan Organisasi serta seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025;
- 7) Rapat koordinasi penilaian Pembangunan Integritas tahun 2025 di Ditjen PDSPKP dengan Inspektorat IV pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025;
- 8) Partisipasi Ditjen PDSPKP pada Rangkaian Kegiatan Peringatan HAKORDIA 9 Desember Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP
- 9) Rapat Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di lingkungan Ditjen PDSPKP pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.



Gambar 43. Monev Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Gratifikasi Semester II Tahun 2025 di Lingkungan Ditjen PDSPKP

k. Kegiatan Terkait Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Sekretaris Jenderal KKP kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum melalui surat Nomor B.1039/SJ/HK.160/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025;
- 2) Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Oktober 2025 berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-3940 tanggal 6 Oktober 2025;



Gambar 44. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan

- 3) Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 November 2025 berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05 4463 tanggal 28 Oktober 2025.
- I. Kegiatan Terkait Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 dan SOP Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat perubahan Tugas dan Fungsi UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan bersama dengan seluruh unit kerja eselon II pusat/direktorat dan perwakilan BBP3KP untuk merumuskan fungsi yang di-*cascad-ing* ke UPT BBP3KP sebagaimana telah ditentukan dalam proses bisnis Ditjen PDSPKP. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025;
 - 2) Rapat penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP bersama dengan Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Penyusunan Klasifikasi UPT berdasarkan variabel utama dan variabel pendukung. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025;



Gambar 45. Rapat Penyusunan Klasifikasi UPT Ditjen PDSPKP

- 3) Rapat finalisasi identifikasi uraian fungsi Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDSPKP bersama dengan seluruh unit kerja eselon II pusat/direktorat

untuk menentukan tugas dan fungsi calon UPT Ditjen PDSPKP yang akan diturunkan sesuai dengan proses bisnis masing-masing unit kerja. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025;

- 4) Rapat Monitoring dan evaluasi (Monev) SOP lingkup Ditjen PDSPKP pasca penyesuaian organisasi dan tata kerja yang baru pada tanggal 4 Desember 2025, dengan agenda utama membahas evaluasi implementasi SOP setelah perubahan OTK. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap unit kerja telah mengadaptasi SOP terbaru sesuai Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta mengidentifikasi bagian yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan lebih lanjut.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar Rp2.408.399.000 sampai dengan periode tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp2.406.051.471 atau setara dengan 99,90%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp2.347.529. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 105,63%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,90%.

3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp218.791.500.000,- (*Dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp63.961.836.000,- (*enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp154.829.664.000,- (*seratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam*

puluh empat ribu rupiah) Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp152.442.506.000,- (*seratus limah puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah*) atau setara dengan 69,67% terhadap total pagu anggaran awal atau 98,46% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

Tabel 9. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025 (Dalam Rp.000)

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Blokir/ Efisiensi	Pagu Efektif	Realisasi	Persentas e Realisasi Thd Pagu Awal	Persentas e Realisasi Thd Pagu Efektif
1	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	81.139.793	39.565.003	41.574.790	41.089.148	50.64%	98,83
2	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	3.823.343	-	3.823.343	3.822.975	99.99%	99,99
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	120.352.094	20.482.677	99.869.417	97.969.085	81.40%	98,10
4	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.400.742	1.593.717	6.807.025	6.806.480	81.02%	99,99
5	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	3.252.781	2.320.439	932.342	932.318	28.66%	100
6	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	1.822.747	-	1.822.747	1.822.498	99.99%	99,99
	Total	218.791.500	63.961.836	154.829.664	152.442.507	69,67	98,46

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per 15 Januari 2026

Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2025 (Dalam Rp.000)

N o	Satker	Pagu	Blokir/Efisiensi	Pagu Efektif	Realisasi	Persentas e Realisasi Pagu Awal	Persentase Realisasi Terhadap Pagu Efektif
1	Pusat	175.877.430	54.424.283	121.453.147	119.618.962	68,01	98,49
2	UPT	38.125.263	4.748.746	33.376.517	32.829.893	86,11	98,36
3	Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	4.788.807	-	0,00	0,00
	Total	218.791.500	63.961.836	154.829.664	152.448.855	69,67	98,46

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu per 15 Januari 2026

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Tahun 2025 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung sampai dengan tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 101,22 (Kategori Baik)

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan IV tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Rumput Laut. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 11. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Rumput Laut	Adanya dinamika harga yang cukup signifikan pada rumput laut kering dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (<i>year on year</i>), penurunan persentase proporsi olahan rumput laut dibandingkan	• upaya promosi/sosialisasi terkait biodiversitas dan potensi rumput laut di Indonesia dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	periode yang sama tahun sebelumnya (<i>year on year</i>), dan ketergantungan yang tinggi pada satu pasar utama	

3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 antara lain :

Tabel 12. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut	upaya promosi/ sosialisasi terkait biodiversitas dan potensi rumput laut di Indonesia dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.	● Peningkatan akses pasar di wilayah Asia-Pasifik melalui partisipasi Busan <i>International Seafood & Fisheries Expo 2025 (BISFE 2025)</i>. Dilaksanakan di kota Busan, Korea Selatan pada 5-7 November 2025 ● Peningkatan akses pasar di wilayah Eropa melalui event <i>Food Ingredients Europe (FIE)</i>. diselenggarakan pada 2–4 Desember 2025 di Paris, Perancis ● Kegiatan <i>market intelligence</i> dan <i>Fi Europe Partner Meeting</i>.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Machmud**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1. Nilai Ekspor Rumput Laut (juta USD)	574
		2. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (miliar USD)	5,68
		3. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (persen)	5
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	5. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	86

Data Anggaran :

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	98.439.406.000
	a. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
	b. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
	c. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
	d. Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
	e. Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
2.	Program Dukungan Manajemen	120.352.094.000
Total Anggaran DJPDSPKP Tahun 2025		218.791.500.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud